

LAPORAN TAHUNAN

2016



KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Pusat Penyuluhan Tahun 2016 disusun sebagai pertanggungjawaban administratif Satuan Kerja Pusat Penyuluhan dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya serta DIPA Satker Pusat Penyuluhan Tahun 2016.

Laporan ini memuat uraian tentang rencana kegiatan peningkatan penyuluhan, pelaksanaan program dan kegiatan penyuluhan baik fisik maupun keuangan, permasalahan serta saran tindak lanjutnya.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan peningkatan penyuluhan di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2017
Kepala Pusat



Dra. Siti Aini Hanum, MA
NIP. 19580207 198403 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup.....	3
II. KONDISI ORGANISASI	4
A. Umum.....	4
B. Sumber Daya Manusia.....	4
C. Struktur Organisasi.....	5
D. Dasar Hukum.....	6
III. RENCANA KEGIATAN TAHUNAN PUSAT PENYULUHAN	8
A. Visi dan Misi	8
B. Tujuan dan Sasaran.....	9
C. Rencana Anggaran Tahun 2016.....	13
IV. PELAKSANAAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN.....	14
1. Perencanaan dan Identifikasi Peningkatan Kelas KTH	14
2. Pembinaan Teknis Kenaikan Kelas KTH	15
3. Fasilitasi Peningkatan Kelas KTH	18
4. Penyelenggaraan Temu Teknis PKSM	19
5. Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS)..	22
6. Fasilitasi Percontohan Pemberdayaan PKSM di KPH	24
7. Fasilitasi Komisi Penyuluh Kehutanan Nasional (KPKN)	26
8. Kesekretariatan Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS/IPKINDO)...	30
9. Pertemuan Forum dan Pemetaan Penyuluh Non Aparatur	38
10. Penyelenggaraan Lomba Wana Lestari Tahun 2016	45
11. Penyelenggaraan Temu Karya Pemenang Lomba dan Apreasi Wana Lestari Tahun 2016	53
12. Pengembangan Materi Penyuluhan	59

13. Percontohan Kelompok Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan ..	61
14. Workshop Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan	65
15. Temu Teknis Penyuluh Kehutanan KSDAE	67
16. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahun 2017	69
17. Penyusunan Dokumen RKA-KL Pusat Penyuluhan Tahun 2017	69
18. Penyusunan Laporan Monev Penyuluhan	70
19. Penyusunan Program Penyuluhan	70
20. Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi	71
21. Penyelenggaraan Penatausahaan BMN	71
22. Penyusunan Laporan Satker (Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan)	72
23. Penyusunan Design SPIP	73
24. Temu Teknis Penyelenggaraan Penyuluhan	73
25. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Koperasi	76
26. Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluhan Kehutanan Pendamping Koperasi	80
27. Verifikasi Pembentukan LP2UKS .	83
28. Penyelenggaraan Pembinaan Penyuluh.....	86
29. Layanan Perkantoran	88
V. ANALISIS PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN	89
VI. PENUTUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rincian Pegawai Pusat Penyuluhan Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan dan Jenis Kelamin.....	5
Tabel 2	Sasaran Program Lingkup Badan P2SDM sesuai RPJM	10
Tabel 3	Sebaran Jumlah Peningkatan Kelas KTH dari Kelas Pemula ke Madya per Provinsi.....	19
Tabel 4	Susunan Keanggotaan KPKN.....	26
Tabel 5	Sebaran data Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dimasing-masing Provinsi	40
Tabel 6	Data Penyuluh Kehutanan Swasta Berdasarkan Perusahaan	42
Tabel 7	Pengembangan Materi Penyuluhan Tahun 2016.....	59
Tabel 8	Nama dan Lokasi KTH Penerima Kegiatan Fasilitasi Percontohan Kelompok Pencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016.....	63
Tabel 9	Daftar LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya Tahun 2016.....	84
Tabel 10	Daftar Kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan Penyuluhan Kehutanan Tahun 2016.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan (PermenLHK No. 18/MENLHK-II/2015).....	6
Gambar 2	Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kelas KTH.....	16
Gambar 3	Pembinaan Kelompok Tani Hutan Oleh Kabid Kelembagaan Penyuluhan.....	18
Gambar 4	Kunjungan Lapangan ke KTH Giri Senang Kabupaten Bandung.....	18
Gambar 5	Sambutan Kepala Pusat Penyuluhan pada Pembukaan Temu Teknis PKSM.....	21
Gambar 6	Penyampaian Materi Diskusi Publik tentang Petunjuk Teknis PKSM oleh Kepala Bidang Ketenagaan Penyuluhan	21
Gambar 7	Kunjungan Lapangan Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan , Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Hutan Masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak	21
Gambar 8	Penyampaian Materi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat oleh Kepala Biro Direktorat PSDH Perum Pehutani	23
Gambar 9	Sosialisasi Permen LHK No: P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat....	23
Gambar 10	Kunjungan Lapangan di Lokasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Eco Edu Tourism Forest Sentul Bogor).....	23
Gambar 11	Posluhdes KTH Peduli Lingkungan Kab. Sinjai – Sulawesi Selatan.....	25
Gambar 12	Pembibitan di Posluhdes KTH Peduli Lingkungan Kab. Sinjai – Sulawesi Selatan	25
Gambar 13	Posluhdes KTH Generasi Muda Pattalangan Kab. Padang Pariaman – Sumatera Barat	25
Gambar 14	Pembuatan Stup Lebah Madu di Posluhdes KTH Generasi Muda Pattalangan Kab. Padang Pariaman – Sumatera Barat	25
Gambar 15	Rapat Triwulan II Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional.....	27
Gambar 16	Pertemuan Komisi Penyuluhan Nasional 3 (tiga) Kementerian dengan Komisi Penyuluhan Provinsi dan Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi.....	27
Gambar 17	Rakontas Bakornas P3K tingkat Eselon I tanggal 13 Januari 2016	36
Gambar 18	Rakontas Bakornas P3K tingkat Eselon I dengan Kementerian Dalam Negeri tanggal 18 Maret 2016	36
Gambar 19	Rakontas Bakornas P3K tingkat Eselon I dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal April 2016.....	37

Gambar 20	Rakontas Bakornas P3K tingkat Eselon I dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal Mei 2016	37
Gambar 21	Pertemuan Forum FPKSN	39
Gambar 22	Kartu Anggota PKSM	41
Gambar 23	Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Barat	47
Gambar 24	Pembukaan Temu Karya oleh Kepala Badan P2SDM	55
Gambar 25	Temu Wicara Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	56
Gambar 26	Pemberian penghargaan kepada Juara Nasional Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2016	56
Gambar 27	Rekreasi ke Gelanggang Samudera Ancol Jakarta	56
Gambar 28	Sharing Antar Peserta Temu Karya Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2016	57
Gambar 29	Rangkaian Kegiatan Workshop Sekolah Lapang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	66
Gambar 30	Peserta Temu Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Penyuluhan	68
Gambar 31	Penyampaian Materi Pengenalan Aplikasi SIMLUH dan CYBEX	69
Gambar 32	Pelaksanaan Kegiatan Temu Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Penyuluhan	75
Gambar 33	Pembuatan Papan Nama Koperasi Produsen Petani Hutan Sejahtera Bersama, Kalimantan Barat	79
Gambar 34	Rapat Penyusunan Kegiatan Koperasi Produsen Petani Hutan Sejahtera Bersama, Kalimantan Barat	79
Gambar 35	Produk Petani Hutan Sejahtera Bersama, Kalimantan Barat	79
Gambar 36	Rangkaian Kegiatan Bimbingan Teknis Koperasi KTH	81
Gambar 37	Wanawiyata Widyakarya SKPK Wana Lestari, Gorontalo	85
Gambar 38	Pembinaan Penyuluh PNS di Provinsi Kalimantan Selatan	88

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang mendukungnya, yaitu SDM yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya alam secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan YME. Sebagai upaya pengembangan kualitas masyarakat di dalam dan sekitar hutan agar maju dan mandiri serta mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, maka peran penyuluhan menjadi sangat strategis yang menjadi bagian integral tidak terpisahkan dari pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan PermenLHK No.39/MenLHK-II/2015 dan Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk setiap tahunnya diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahunnya sampai dengan Tahun 2019.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019. Tiga Pilar Pembangunan Nasional, pengelolaan SDA lestari dan berkelanjutan menjadi salah satu tumpuan pembangunan dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur dengan memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta paralel meningkatkan kemampuan SDA untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Penyuluhan kehutanan diposisikan paling depan dalam setiap aktivitas pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan karena merupakan bagian integral pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sehingga harus terstruktur,

direncanakan, dilembagakan, dilaksanakan dan dikembangkan secara terus menerus dalam rangka mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mencapai rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah disusun Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2016. Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut Pusluh menyusun Laporan Tahunan Pusat Penyuluhan Tahun 2016 sesuai dengan peraturan yang ada.

Laporan Tahunan Satuan Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2016 merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi, perkembangan dan hasil yang telah dicapai oleh Pusat Penyuluhan dalam periode satu tahun.

Laporan Tahunan ini berisikan uraian yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana), hasil kegiatan program, pencapaian kinerja dan masalah, hambatan serta terobosan/inovasi sebagai upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan satker.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Tahunan 2016 adalah sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan Satuan Kerja Pusat Penyuluhan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan selama tahun 2016.

Tujuannya adalah untuk menyajikan data dan informasi yang merupakan evaluasi pencapaian hasil kegiatan penyuluhan kehutanan baik fisik maupun keuangan sebagai bahan masukan untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan di masa mendatang.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Tahunan 2016 ini meliputi: Pendahuluan, Kondisi, Rencana Kegiatan Tahun 2016, Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016, Pelaksanaan Anggaran, Analisa Permasalahan dan Upaya Pemecahan dan Saran/Rekomendasi.

II. KONDISI ORGANISASI

A. Umum

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan bahwa kedudukan Pusat Penyuluhan (Pusluh) sebagai Eselon II yang berkedudukan dibawah Eselon I, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tugas Pusat Penyuluhan : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan.

Fungsi Pusat Penyuluhan :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
2. Penyiapan pelaksanaan tugas pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
4. Bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Pusat.

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mendukung kegiatan Pusat Penyuluhan per 31 Desember 2016 berjumlah 48 orang, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jenis kelamin dan pendidikan.

Tabel.1 Rincian Pegawai Pusat Penyuluhan Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan dan Jenis Kelamin.

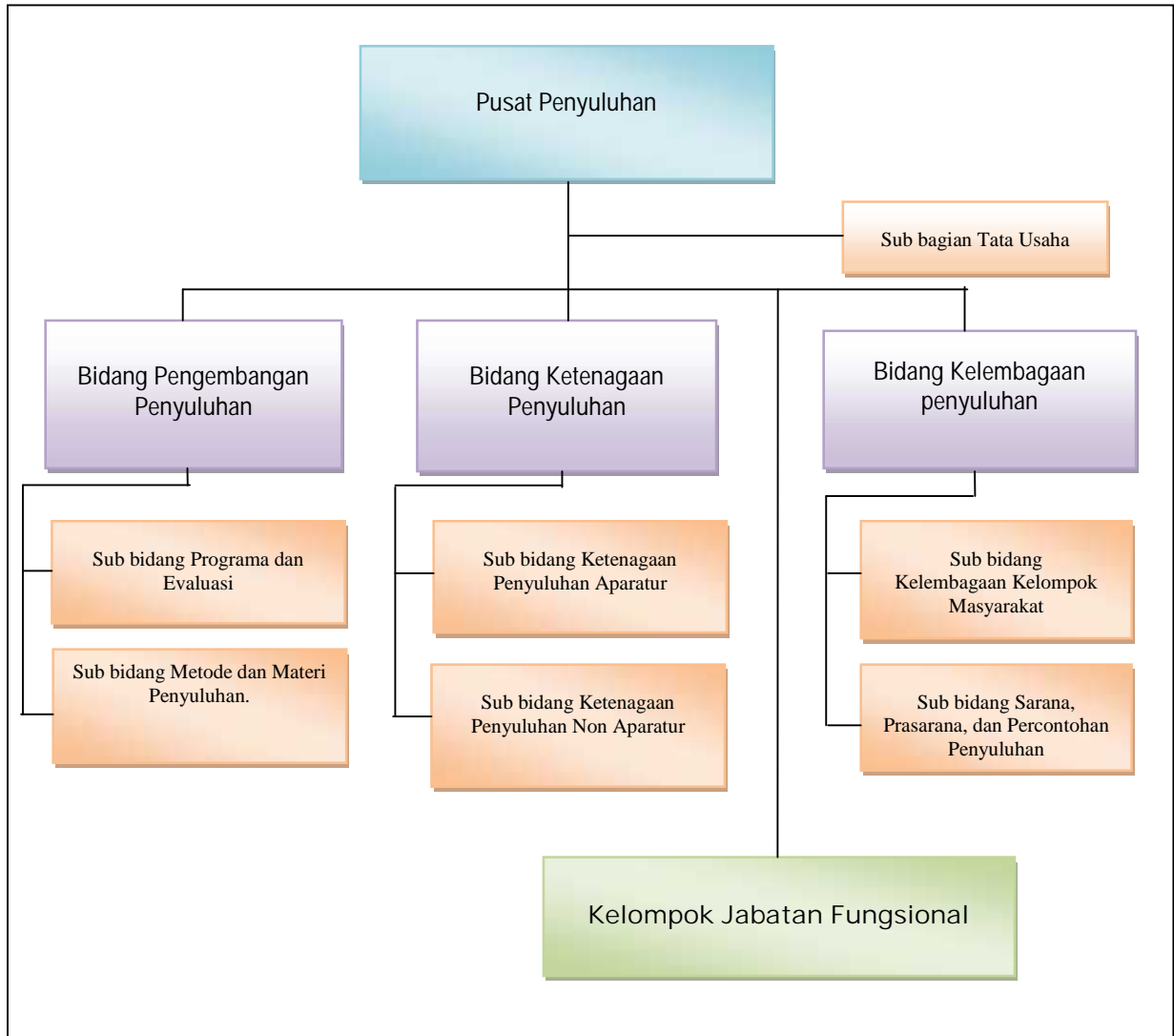
NO.	Jenjang Pendidikan	GOL. IV		GOL. III		GOL. II		GOL. I		JUMLAH		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	TOTAL
1.	Doktor	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Pascasarjana	9	2	6	1	-	-	-	-	15	3	18
3.	Sarjana	-	3	8	11	-	-	-	-	8	14	22
4.	Sarjana Muda	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2
5.	SLTA	-	-	3	-	1	-	-	-	4	-	4
6.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	SD	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
	Jumlah (L+P)	9	6	17	12	4	0	0	0	30	18	48
	Jumlah per Gol.	14		30		4		0		48		48

Keterangan : Tenaga Honorer : 8 orang

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.18/MENLHK-II/2015 terdiri dari Tiga Eselon III dan Tujuh Eselon IV, yaitu :

1. Bidang Pengembangan Penyuluhan.
2. Bidang Ketenagaan Penyuluhan.
3. Bidang Kelembagaan penyuluhan.
4. Sub bagian Tata Usaha.
5. Sub bidang Program dan Evaluasi.
6. Sub bidang Metode dan Materi Penyuluhan.
7. Sub bidang Ketenagaan Penyuluhan Aparatur.
8. Sub bidang Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur.
9. Sub bidang Kelembagaan Kelompok Masyarakat.
10. Sub bidang Sarana, Prasarana, dan Percontohan Penyuluhan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan (PermenLHK No. 18/MENLHK-II/2015)

D. Dasar Hukum

Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan tahunan Tahun 2015 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014;
8. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.39/MENLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;

III. RENCANA KEGIATAN TAHUNAN PUSAT PENYULUHAN

A. Visi dan Misi

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yang menjadi prioritas terdapat dalam sembilan agenda yang disebut Nawa Cita, yaitu: 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia; 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Visi pembangunan Tahun 2015-2019 yang merupakan arah pembangunan seluruh kementerian di Indonesia adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", sedangkan misi untuk mendukung tercapainya visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pembangunan Kehutanan Indonesia diselenggarakan berlandaskan pada mandat Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu bahwa pengurusan sumber daya alam hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem, dan dimensi yang menjadi mandat penyelenggaraan urusan kehutanan diimplementasikan dalam 4 upaya pokok yaitu : (1) perencanaan hutan, (2) pengelolaan hutan, (3) penelitian, pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan , (4) pengawasan dan pengendalian.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu "Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia; dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman; serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional".

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut dirumuskan sasaran strategis Kementerian LHK Tahun 2015-2019, yaitu:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH

terhadap devisa dan PNB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;

Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

Sasaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM selama periode Tahun 2015 – 2019 yaitu: (1) Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara, (2) Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam Renstra BP2SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Sasaran Program Lingkup Badan P2SDM sesuai RPJM

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2015-2019
1. Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Meningkatkan Kompetensinya Bertambah Setiap Tahun untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara. 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya, 5.500 unit KTH dan Koperasi. Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang. Jumlah SDM Aparatur LHK/SMK Kehutanan yang meningkat kapasitasnya, 37.640 orang.

Dalam RPJMN Kementerian LHK Tahun 2015 – 2019, indikator kegiatan penyuluhan dalam mendukung Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Tahun 2015 – 2019 adalah : “Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya sebanyak 5.500 unit KTH”, dengan empat sasaran indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya kelas kelompok tani hutan dari kelas pemula ke madya sejumlah 5000 unit;
2. Terbentuknya koperasi kelas kelompok tani hutan sejumlah 500 unit;
3. Terbentuknya Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sejumlah 250 unit;
4. Meningkatnya kapasitas jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan sebanyak 5000 orang.

Dalam implementasi Kegiatan Peningkatan Penyuluhan dibagi ke dalam empat sub kegiatan yang diuraikan dalam output kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Vol	Satuan
029.08.10	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM		
5444	Peningkatan Penyuluhan		
5444.001	Meningkatnya kelas kelompok tani hutan dari kelas pemula ke madya [Base Line]	450	KTH
051	Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kelas KTH		
A	Perencanaan dan Identifikasi Peningkatan Kelas KTH	1	Laporan
B	Pembinaan Teknis Kenaikan Kelas KTH	1	Laporan
C	Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) di KPH dan HR	1	Laporan
D	Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS)	1	Laporan
E	Fasilitasi Percontohan Pemberdayaan PKSM di KPH	1	Laporan
F	Fasilitasi Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional (KPKN)	1	Laporan
G	Kesekretariat Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS)/IPKINDO	1	Laporan
I	Pertemuan Forum dan Pemetaan Penyuluh Non Aparatur	1	Laporan
052	Pengembangan Metode, Materi dan Sarpras Penyuluhan		
A	Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2016	1	Laporan
B	Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2016	1	Laporan

Kode	Uraian	Vol	Satuan
C	Penggandaan Materi Penyuluhan	1	Laporan
D	Penyusunan dan Penerbitan Majalah Kenari	1	Edisi
E	Publikasi Penyuluhan di Media Cetak dan Media Elektronik	1	Laporan
F	Percontohan Kelompok Pencegah Kebakaran Hutan dan Lahan	1	Laporan
G	Workshop pengembangan materi penyuluhan	1	Laporan
H	Temu Teknis Penyuluh Kehutanan KSDAE	1	Laporan
053	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluhan Kehutanan		
A	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahun 2017	1	Dokumen
B	Penyusunan Dokumen RKA-KL Pusat Penyuluhan Tahun 2017	1	Dokumen
C	Penyusunan Laporan Monev Penyuluhan	1	Laporan
D	Penyusunan Program Penyuluhan	1	Dokumen
E	Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi	1	Laporan
F	Penyelenggaraan Penatausahaan BMN	1	Laporan
G	Penyusunan Laporan Satker (Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan)	19	Laporan
H	Penyusunan LAKIP Satker Pusluh Tahun 2015	1	Laporan
J	Penyusunan Design SPIP	1	Laporan
K	Temu Teknis Penyelenggara Penyuluhan	1	Laporan
5444.002	Terbentuknya Koperasi Kelompok Tani Hutan [Base Line]	22	Unit
5444.002.001	Pengembangan kelembagaan usaha KTH (pembentukan/pengembangan koperasi)		
051	Fasilitasi penguatan dan pengembangan koperasi KTH		
A	Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Koperasi	22	Unit
B	Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Pendamping Koperasi	1	Laporan
5444.003	Terbentuknya Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) [Base Line]	10	Unit
051	Pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)		
A	Verifikasi pembentukan LP2UKS	1	Laporan
B	Fasilitasi pembentukan LP2UKS	10	Unit
5444.004	Terbentuknya Tenaga Pendamping Handal bagi KTH [Base Line]	300	Orang
051	Pembinaan Teknis Penyuluh		
A	Penyelenggaraan Pembinaan Penyuluh	1	Laporan
5444.994	Layanan Perkantoran [Base Line]		
002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1	Laporan

C. Rencana Anggaran Tahun 2016

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Satuan Kerja Pusat Penyuluhan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Surat Pengesahan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-029.08.1.400206/2016 tanggal 31 Oktober 2016 berjumlah Rp. 18.247.053.000,-.

Jumlah tersebut terdiri dari anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.15.132.253.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.3.114.800.000,-.

BAB IV

PELAKSANAAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN

A. Meningkatnya Kelas Kelompok Tani Hutan Dari Kelas Pemula Ke Madya

1. Perencanaan dan Identifikasi Peningkatan Kelas KTH

Sesuai dengan RPJM tahun 2015-2019 Pusat Penyuluhan BP2SDM memiliki target meningkatkan 5.000 unit kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) dari pemula menjadi madya yang tersebar di 33 Provinsi. Dengan banyaknya jumlah KTH yang akan dilakukan peningkatan kelas KTH, diperlukan rencana dan data KTH kelas pemula di seluruh Indonesia yang tersebar di 33 provinsi. Kita juga harus tepat dalam memilih KTH kelas pemula yang akan ditingkatkan kelasnya menjadi KTH Madya dengan menggunakan ketentuan Permenhut Nomor 57/Menhut-II/2014 tentang Pembinaan Kelompok Tani Hutan, serta kebutuhan yang diperlukan untuk peningkatan kelas tersebut, sehingga peningkatan kelas akan tepat pada sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk kelancaran kegiatan dan proses peningkatan kelas KTH perlu untuk dilakukan Perencanaan dan identifikasi peningkatan kelas KTH.

Maksud dari kegiatan perencanaan dan identifikasi peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah untuk mengetahui data/informasi tentang KTH yang meliputi jumlah KTH, klasifikasi kemampuan kelas KTH, lokasi KTH, jenis usaha KTH dan lain-lain di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan tujuannya adalah menyediakan data/informasi KTH sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) di masa mendatang dan sebagai sumber data kondisi KTH secara umum di seluruh provinsi dalam memilah dan memilih KTH yang akan diberikan kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat KTH.

Keluaran/output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan perencanaan dan identifikasi peningkatan kelas KTH adalah tersedianya data/informasi tentang KTH yang meliputi jumlah KTH, klasifikasi kemampuan kelas KTH, lokasi KTH, jenis usaha KTH dan lain-lain di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan perencanaan dilakukan melalui rapat-rapat pertemuan, sebagai persiapan dan bahan untuk melaksanakan kegiatan identifikasi peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan (KTH).

Pelaksanaan kegiatan identifikasi peningkatan kelas KTH dilakukan dengan koordinasi atau kunjungan ke berbagai provinsi/kabupaten/kota sesuai anggaran yang tersedia. Kegiatan identifikasi peningkatan kelas KTH dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh data/informasi tentang KTH yang meliputi data tentang jumlah KTH, lokasi KTH, klasifikasi kemampuan kelas KTH KTH, kegiatan/usaha yang dilakukan KTH dan lain-lain.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 242.111.000,- terealisasi keuangan Rp 242.054.100,- atau 99,98 % dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

2. Pembinaan Teknis Kenaikan Kelas KTH

Dalam rangka percepatan terwujudnya kelembagaan masyarakat di tingkat tapak yang kuat, Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan tahun 2015 – 2019 menargetkan naiknya kelas Kelompok Tani Hutan dari pemula menjadi madya sebesar 5000 KTH. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan KTH oleh Penyuluh Kehutanan mulai dari kegiatan identifikasi, klasifikasi dan fasilitasi KTH yang ada di seluruh provinsi.

Agar pelaksanaan pembinaan KTH, khususnya dalam hal pendampingan peningkatan kelas KTH oleh Penyuluh Kehutanan dapat berjalan efektif dan efisien, telah diterbitkan Petunjuk Teknis Pendampingan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) oleh Pusat Penyuluhan BP2SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dijadikan acuan bagi Penyuluh Kehutanan dan instansi pembina KTH di lapangan.

Pada tahun 2016 kegiatan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) dilaksanakan melalui mekanisme dana dekonsentrasi di seluruh provinsi.

Agar implementasi dari kegiatan pendampingan peningkatan kelas KTH di lapangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu penyamaan persepsi bagi personel yang menangani kegiatan tersebut. Oleh karenanya, perlu

dilakukan kegiatan Pembinaan Teknis Kenaikan Kelas KTH bagi penyuluh kehutanan provinsi atau petugas yang menangani kegiatan tersebut.

Pembinaan Teknis Kenaikan Kelas KTH dimaksudkan untuk menyamakan persepsi bagi personel yang akan menangani kegiatan pendampingan peningkatan kelas KTH melalui dana dekonsentrasi. Adapun tujuannya adalah agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Output yang diharapkan dari Pembinaan Teknis Kenaikan Kelas KTH ini adalah meningkatnya wawasan dan pemahaman penyuluh atau petugas pengelola dana dekonsentrasi tentang kegiatan peningkatan kelas KTH.

Adapun Outcome yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja penyuluh atau petugas pengelola dana dekonsentrasi tentang kegiatan peningkatan kelas KTH.

Pada tahun 2016, Pembinaan Teknis Kenaikan Kelas KTH diselenggarakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 24 s/d 26 Januari 2016 di Hotel The Jayakarta, Bandung. Peserta Pembinaan Teknis Kenaikan Kelas KTH sebanyak ± 68 orang, terdiri dari:

- a. Penyuluh kehutanan yang berada di provinsi yang ditunjuk sebagai verifikator kegiatan peningkatan kelas KTH tahun 2016 yang bersumber dari dana dekonsentrasi tahun 2016.
- b. Apabila di provinsi tidak ada penyuluh kehutanan, maka peserta adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Provinsi berdasarkan SK Penunjukan.



Gambar 2 . Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kelas KTH

Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

Tgl/Waktu	Acara	Pembicara/ Fasilitator/ Moderator/ MC	Keterangan
Rabu, 24 Februari 2016			
12.00 -16.00	Registrasi dan Ishoma		Panitia
16.00 – 17.30	Pembukaan: 1. Doa 2. Laporan Panitia 3. Lagu Indonesia Raya 4. Sambutan Sekretaris Bakorluh Jabar 5. Pembukaan oleh Kepala Pusat Penyuluhan	Kabid Kelembagaan Penyuluhan Kepala Set Bakorluh Jabar Kapusluh	MC 1: Siwi Tri, S.Hut MC 2: Atu Badariah, S.Hut Dirigen : Ir. Endang D. H, MM Doa : Akhmad R, SP, MM
17.30 – 19.00	Ishoma		
19.00 – 20.30	Pembinaan Kelompok Tani Hutan	Pembicara: Kabid Kelembagaan Penyuluhan Moderator: Kasubid Sarpras dan Percontohan Penyuluhan	
20.30 – 21.45	Arahan teknis dana dekonsentrasi	Pembicara : Kasubid kelembagaan kelompok masyarakat Moderator: Murtado	
Kamis, 25 Februari 2016			
06.00 – 07.00	Makan pagi		Hotel
07.00 – 08.30	Perjalanan menuju lokasi KTH 1	Seksi kunjungan lapang	snack pagi di lokasi KTH 1,
08.30 – 10.30	Kunjungan lapangan KTH 1	Seksi kunjungan lapang	
10.30 – 11.00	Sharing pengalaman	M. Yusuf Moderator: Dr. Yumi	
11.00 - 12.00	Perjalanan menuju kTH 2	Seksi kunjungan lapang	
12.00 – 13.00	Ishoma	Seksi kunjungan lapang	makan siang di lokasi KTH 2
13.00 – 15.00	Kunjungan ke KTH 2	Seksi kunjungan lapang	
15.00 – 15.30	Sharing pengalaman	Moderator: Ir. Endang, MM	
15.30 – 16.00	Coffee break	Seksi kunjungan lapang,	snack sore (box) di KTH 2
16.00 – 18.00	Perjalanan menuju hotel	Seksi kunjungan lapang	
18.00 – 19.00	Ishoma		Hotel
19.00 – 21.15	Arahan Kebijakan Pusat Penyuluhan	Pembicara : Kapusluh Moderator : Kabid Kelembagaan Penyuluhan	
Jumat, 26 Februari 2016			
06.00 – 07.30	Makan pagi		
07.30 – 08.30	Penyelesaian administrasi		Panitia
08.30 – 09.00	Penutupan		
11.00	Cek Out		



Gambar 3 . Pembinaan Kelompok Tani Hutan oleh Kabid Kelembagaan Penyuluhan



Gambar 4. Kunjungan Lapangan ke KTH Giri Senang, Kabupaten Bandung

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 393.440.000,- terealisasi keuangan Rp. 393.236.000,- atau 99,95% dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

3. Fasilitasi Peningkatan Kelas KTH

Fasilitasi peningkatan kelas KTH dilakukan melalui fasilitasi Kepada 30 Provinsi jumlah total 450 KTH yang diperoleh melalui fasilitasi dana Dekonsentrasi Penyuluhan sebanyak 255 KTH dan regulasi/intervensi kebijakan ke daerah sebanyak 195 KTH.

Pembentukan, penguatan dan pengembangan Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan fasilitasi peningkatan kelas KTH merupakan upaya dalam pembinaan KTH.

Fasilitasi pengembangan KTH dilakukan dalam bentuk peningkatan kelas kelompok tani hutan dari pemula menjadi madya dalam rangka penguatan kelembagaannya. Kegiatan fasilitasi peningkatan kelas KTH dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas KTH melalui pemantapan kelola kelembagaan, kawasan dan usaha sehingga dapat meningkatkan kelas kelompok dari pemula menjadi madya. Adapun tujuannya adalah terlaksananya kegiatan peningkatan kelas KTH secara efektif, efisien, berhasil guna, berdaya guna dan berkelanjutan. Sebaran jumlah peningkatan kelas KTH dari pemula ke madya per provinsi sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Sebaran jumlah peningkatan kelas KTH dari kelas pemula ke madya per provinsi

No	Provinsi	Kenaikan Kelas KTH	
		Dana Dekon (org)	Regulasi (org)
1	Banten	16	-
2	Jawa Barat	10	88
3	Jawa Tengah	30	2
4	Jawa Timur	-	63
5	DI Yogyakarta	20	-
6	Aceh	9	2
7	Sumatera Utara	-	1
8	Sumatera Barat	11	1
9	Riau	4	4
10	Kep. Riau	-	1
11	Jambi	4	4
12	Bangka Belitung	8	1
13	Sumatera Selatan	2	5
14	Bengkulu	-	1
15	Lampung	14	-
16	Kalimantan Barat	2	5
17	Kalimantan Tengah	-	4
18	Kalimantan Selatan	7	4
19	Sulawesi Utara	13	1
20	Sulawesi Tengah	6	1
21	Sulawesi Selatan	15	-
22	Sulawesi Tenggara	17	1
23	Gorontalo	16	1
24	Sulawesi Barat	10	1
25	Maluku	4	-
26	Maluku Utara	8	1
27	Bali	7	1
28	NTB	9	1
29	NTT	10	1
30	Papua	3	-
	Total	255	195

4. Penyelenggaraan Temu Teknis PKSM

Pengakuan terhadap peran penting PKSM sebagai mitra kerja penyuluh kehutanan PNS di tingkat tapak, antara lain diwujudkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2012 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang sudah direvisi dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016.

Untuk meningkatkan motivasi dan peran PKSM dalam pembangunan kehutanan, khususnya dalam kegiatan Perhutanan Sosial, Pencegahan Kebakaran Hutan dan

Lahan, dan Restorasi Ekosistem, pada tahun 2016 Pusat Penyuluhan mengadakan kegiatan “Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) tahun 2016”.

Temu Teknis PKSM tahun 2016 dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi PKSM dalam melakukan pendampingan masyarakat, khususnya dalam kegiatan Perhutanan Sosial, Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Restorasi Ekosistem.

Adapun tujuannya adalah untuk : (1) meningkatkan wawasan dan pemahaman PKSM tentang Perhutanan Sosial, Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Restorasi Ekosistem; dan (2) meningkatkan jejaring kerjasama antar PKSM.

Output yang diharapkan dari Temu Teknis PKSM adalah meningkatnya wawasan dan pemahaman 50 orang PKSM khususnya tentang Perhutanan Sosial, Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Restorasi Ekosistem.

Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kompetensi, motivasi dan kinerja PKSM dalam pendampingan masyarakat, khususnya Perhutanan Sosial, Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Restorasi Ekosistem.

Pada tahun 2016, Peserta Temu Teknis PKSM Tahun 2016 yang diundang sebanyak 50 orang. Peserta yang hadir merupakan rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi di 12 Provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara yang nantinya diharapkan dapat meningkatnya wawasan dan pemahaman khususnya tentang Perhutanan Sosial, Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Restorasi Ekosistem.



Gambar 5. Sambutan Kepala Pusat Penyuluhan pada Pembukaan Temu Teknis PKSM

Materi kegiatan Temu Teknis PKSM tahun 2016 antara lain:

1. Arahan dan kebijakan penyuluhan dalam menunjang pembangunan bidang Kehutanan.
2. Diskusi publik tentang petunjuk teknis PKSM.
3. Kebijakan penyiapan kawasan perhutanan sosial.
4. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak.
5. Pendampingan restorasi ekosistem.

Narasumber/fasilitator berasal dari Pusat Penyuluhan, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Ditjen PSKL), Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Ditjen PPI), dan Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi (Ditjen PHPL).



Gambar 6. Penyampaian materi Diskusi Publik Tentang Petunjuk Teknis PKSM oleh Kepala Bidang Ketenagaan Penyuluhan



Gambar 7. Kunjungan Lapangan Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Hutan Masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 300.550.000,- terealisasi keuangan Rp. 300.162.315,- atau 99,87% dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

5. Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS)

Pengakuan terhadap peran penting PKS sebagai mitra kerja penyuluh kehutanan PNS untuk perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, dengan mengacu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2012 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang sudah direvisi dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016.

Penyelenggaraan Temu Teknis PKS tahun 2016 dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan PKS dalam melakukan pendampingan masyarakat, khususnya dalam kegiatan kemitraan, PHBM dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Adapun tujuannya adalah untuk : (1) meningkatkan koordinasi dan komunikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan PKS serta (2) meningkatkan jejaring kerjasama di antara PKS.

Output yang diharapkan dari Temu Teknis PKS adalah:

1. meningkatnya wawasan dan pemahaman 50 orang PKS khususnya dalam pengembangan kemitraan kehutanan, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, serta Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. terbentuknya Forum Penyuluh Kehutanan Swasta sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar sesama PKS, serta PKS dengan Kementerian LHK.

Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya motivasi dan kinerja PKS dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pada tahun 2016, Temu Teknis PKS Tahun 2016 diselenggarakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 14 s/d 16 September 2016 di Hotel 101, Jl. Suryakencana Bogor, Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang PKS. Peserta yang hadir merupakan rekomendasi dari pimpinan-pimpinan perusahaan di Perum Perhutani, PT. Riau Andalan Pulp and Paper, PT. Arara Abadi, PT. Sumalindo Hutani Jaya, PT. Wana Hijau Pesaguan, PT. Setyamitra Bhakti Persada, PT. Musi

Hutan Persada dan KSU Sengon Agung Bersama yang bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat/pemberdayaan/penyuluhan kehutanan & lingkungan.

Materi kegiatan Temu Teknis PKS tahun 2016 antara lain:

1. Arah dan kebijakan penyuluhan dalam menunjang pembangunan bidang Kehutanan.
2. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.
3. Program Pencegahan Kebakaran Hutan (Fire Free Village).
4. Program Pendampingan Masyarakat (CSR Ekonomi Kerakyatan).
5. Sosialisasi Permen LHK No: P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat.

Narasumber/fasilitator berasal dari Pusat Penyuluhan, Kepala Biro Direktorat PSDH Perum Perhutani, Manager Fire Free Village PT. Riau Andalan Pulp and Paper, dan Manager CSR PT. Arara Abadi.



Gambar 8. Penyampaian materi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat oleh Kepala Biro Direktorat PSDH Perum Perhutani



Gambar 9. Sosialisasi Permen LHK No: P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh



Gambar 10. Kunjungan Lapangan di Lokasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Eco Edu Tourism Forest Sentul Bogor)

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp.279.750.000,- terealisasi keuangan Rp.278.954.724,- atau 99,72% dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

6. Fasilitasi Percontohan Pemberdayaan PKSM di KPH

Kegiatan Fasilitasi Percontohan Pemberdayaan PKSM di KPH diwujudkan dengan kegiatan Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (Posluhutdes) Tahun 2016, pemerintah memberikan kesempatan kepada PKSM untuk berperan aktif dalam pembangunan kehutanan. PKSM berperan sebagai fasilitator, stimulator (perangsang) dan motivator (pendorong).

Peran PKSM sebagai secara rinci sebagai berikut:

- a. Fasilitator, PKSM dapat membantu dan mengembangkan nilai-nilai produktivitas yang telah dimiliki oleh masyarakat.
- b. Stimulator, PKSM membantu merangsang tumbuhnya kreativitas dan ide-ide masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kehutanan.
- c. Motivator, PKSM dapat mendorong produktivitas masyarakat agar lebih maju dan berkembang menjadi kelompok-kelompok usaha produktif yang lebih maju dan mandiri.

Pembentukan dan pengembangan Posluhutdes dimaksudkan untuk meningkatkan peran kelembagaan masyarakat di pedesaan dalam kegiatan pembangunan kehutanan. Tujuan pembentukan dan pengembangan Posluhutdes adalah:

1. Meningkatkan kegiatan pembelajaran dan penyebaran informasi pembangunan kehutanan bagi masyarakat di pedesaan;
2. Memperkuat jejaring kerja penyuluhan kehutanan di pedesaan;
3. Meningkatkan keswadayaan dan kemandirian masyarakat di pedesaan dalam pembangunan kehutanan.

Pada tahun 2016, total penerima fasilitasi Percontohan Pemberdayaan PKSM di KPH berjumlah 10 (sepuluh) KTH, sebagai berikut:

No	NAMA PKSM	KTH BINAAN	PROVINSI	PK PENDAMPING
1	Tasemat	KTH Wana Lestari	Jawa Timur	Suyatno, SP
2	Azizah Ahmad, S.Pd.I	KTH Sumber Urip	Jawa Timur	Sudarto
3	Abd Rahman	KTH Baru Muncul	Jawa Timur	Budi Djoko Triyono, SP
4	Moh. Ihsan Effendi	KTH Suka Rela	NTB	Rusmin, SP
5	Abd. Haris Tamburaka	KTH Samaturu	Sulawesi Tenggara	Desyuliasari, S.Hut
6	Supirman, SPd	KTH Generasi Muda Patalangan	Sumatera Barat	Windra, SP
7	Ahadi Mazid	KTH Jaya Teriti	Sumatera Selatan	Winarsih, S.Hut
8	Umar Mansyur, S.Pd	KTH. Lestari 1	Lampung	Purwadi
9	H. Hasan Suaib	KTH Pattontongan	Sulawesi Selatan	Ridwan Rasyid, S.Hut
10	Amir Esa	KTH Peduli Lingkungan	Sulawesi Selatan	Muhlis, S.Hut, M.Si

Kegiatan penyuluhan 10 KTH Penerima fasilitasi Posluhutdes Tahun 2016 cukup beraneka ragam, dimulai dari demplot persemaian (pembibitan) Tanaman kayu, buah & endemic (tanaman khas suatu daerah).



Gambar 11. Posluhutdes KTH Peduli Lingkungan Kab. Sinjai – Sulse



Gambar 12. Pembibitan di Posluhutdes KTH Peduli Lingkungan Kab. Sinjai – Sulse



Gambar 13. Posluhutdes KTH Generasi Muda Patalangan Kab. Padang Pariaman – Sumbar



Gambar 14. Pembuatan stup lebah madu di Posluhutdes KTH Generasi Muda Patalangan Kab. Padang Pariaman – Sumbar

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp.279.750.000,- terealisasi keuangan Rp.278.954.724,- atau 99,72% dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

7. Fasilitasi Komisi Penyuluh Kehutanan Nasional (KPKN)

Amanat Undang-Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pasal 10 mengisyaratkan bahwa untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan, Menteri Kehutanan dibantu oleh Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional. Tugas Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional adalah memberikan masukan kepada menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kehutanan. Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Kehutanan terakhir telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: SK.198/Menhut-II/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional.

Maksud penyelenggaraan Sekretariat KPKN adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Komisi sehingga mampu memberikan rekomendasi kebijakan penyuluhan kehutanan secara optimal kepada Menteri. Sedangkan tujuannya adalah kegiatan Komisi bisa didukung administrasi dan pendanaan secara optimal sehingga kinerja Komisi bisa mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 4. Susunan keanggotaan KPKN

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc	Ketua	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Ir. Soetino Wibowo	Wakil Ketua	Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTII)
3	Drs. Trisnu Danisworo, MS.	Sekretaris	Lembaga Sertifikasi Profesi RINO (LSP-RINO)
4	Ir. I M Subadia Gelgel, M.Sc	anggota	Board of Member CTC (Coral Triangel Center) dan Board of Member Restorasi Ekosistem Riau (RER)
5	Ir. Indriastuti, MM	anggota	Lembaga Sertifikasi Profesi Kehutanan Indonesia (LSP-HI)
6	Prof. Dr. Ir. Soemardjo, M.Si	Anggota	Institut Pertanian Bogor
7	Ir. Bambang Sigit S, MM	Anggota	Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (IPKINDO)
8	Drs. H. Maman Suparman	Anggota	Himpunan Pelestari Hutan Andalan (HPHA)

Pada tahun 2016 pelaksanaan Rapat yang telah dilakukan oleh KPKN sebanyak 2 kali rapat triwulan (tanggal 15 maret 2016 dan 7 September 2016), 1 kali rapat konsolidasi dengan Komisi Penyuluhan 3 (tiga) Kementerian pada tanggal 16 Mei 2016, dan rapat pertemuan Komisi Penyuluhan Nasional 3 (tiga) Kementerian dengan Komisi Penyuluhan Provinsi dan Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi pada tanggal 2 s/d 4 November 2016.



Gambar 15. Rapat Triwulan II Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional



Gambar 16. Pertemuan Komisi Penyuluhan Nasional 3 (tiga) Kementerian dengan Komisi Penyuluhan Provinsi dan Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi

Hasil rapat KPKN adalah sebagai berikut:

1. Penyuluh Lingkungan Hidup sampai saat ini belum diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. Untuk itu perlu didorong oleh Pusat Penyuluhan Kementerian LHK agar regulasi dimaksud bisa diterbitkan.
2. Materi penyuluhan Kehutanan perlu ditambahkan muatan tentang Lingkungan Hidup melalui peningkatan kapasitas penyuluh atau pembinaan penyuluhan (binluh).
3. Tenaga penyuluh Kehutanan sangat kurang baik jumlah maupun kualitasnya sehingga perlu didorong baik Propinsi maupun Pusat untuk mengusulkan formasi tenaga penyuluh PNS serta peningkatan kapasitas/kemampuan penyuluh.
4. Rekomendasi kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup hasil pembahasan bersama Komisi Penyuluhan Pertanian

Nasional, Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional dan Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional adalah sebagai berikut:

a. Pada Tingkat Nasional

(1) Kelembagaan penyuluhan pemerintah secara struktural yang mempunyai tugas penyelenggaraan dan pelaksanaan operasional penyuluhan terkait dengan organisasi teknis struktural masing-masing di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, dan lingkungan hidup, yaitu:

- (a) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Pertanian;
- (b) Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- (c) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(2) Kelembagaan penyuluhan pemerintah tersebut didukung dengan organisasi non struktural yang mempunyai tugas koordinasi penyuluhan lintas sektor, yaitu :

- (a) Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai organisasi non struktural harus tetap dibentuk dengan ketua adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang beranggotakan antara lain Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Pejabat Pemerintah yang terkait, serta ditambah Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional, Ketua Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional, serta Ketua Komisi Penyuluhan Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nasional.
- (b) Untuk membantu Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup tetap dibentuk Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, sebagai organisasi non struktural yang

diketahui oleh Kepala Badan secara bergantian setiap 2 (dua) tahun, dan mengalokasikan anggaran kesekretariatan untuk keperluan koordinasi di tingkat Nasional.

- (c) Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan masing-masing tetap membentuk Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional, Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional dan Komisi Penyuluhan Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nasional, yang bertugas memberikan masukan bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan tingkat Nasional kepada masing-masing Menteri.
- (d) Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional, Ketua Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional, dan Ketua Komisi Penyuluhan Kehutanan dan Lingkungan Hidup ditunjuk juga sebagai anggota Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Lingkungan Hidup, agar kebijakan penyuluhan secara nasional dapat diikuti perkembangannya oleh Komisi Penyuluhan Nasional dari 3 (tiga) Kementerian.

b. Pada Tingkat Provinsi

Kelembagaan penyuluhan provinsi secara struktural yang mempunyai tugas pelaksanaan operasional penyuluhan terkait dengan organisasi teknis struktural masing-masing di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, dan lingkungan hidup, yaitu:

- (1) Dinas Daerah Provinsi yang mempunyai tugas teknis pertanian;
- (2) Dinas Daerah Provinsi yang mempunyai tugas teknis perikanan;
- (3) Dinas Daerah Provinsi yang mempunyai tugas teknis kehutanan;
- (4) Dinas Daerah Provinsi yang mempunyai tugas teknis lingkungan hidup.

c. Pada Kabupaten/Kota

- (1) Kelembagaan penyuluhan Kabupaten/Kota secara struktural yang mempunyai tugas pelaksanaan operasional penyuluhan terkait

dengan organisasi teknis struktural masing-masing di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, dan lingkungan hidup, yaitu:

- (a) Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas teknis pertanian;
 - (b) Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas teknis perikanan;
 - (c) Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas teknis kehutanan;
 - (d) Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas teknis lingkungan hidup.
- (2) Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi ditunjuk juga sebagai anggota Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, agar kebijakan penyuluhan di tingkat Provinsi dapat diikuti perkembangannya oleh Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

5. Penyuluh yang telah mengikuti sertifikasi penyuluh, legalitas kompetensinya banyak yang telah habis masa berlakunya. Karena itu, perlu dianggarkan kembali untuk memperbaharui legalitas kompetensi penyuluh tersebut. Terhadap penyuluh yang sudah melalui uji kompetensi, diusulkan untuk dipertimbangkan dalam uji kompetensi kenaikan jabatan.

Dari pagu anggaran kegiatan KPKN sebesar Rp. 144.350.000,- terealisasi keuangan Rp. 144.217.100,- atau 99,91% dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

8. Kesekretariatan Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS/IPKINDO)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pasal 9 ayat (3), dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan secara berkelanjutan, diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan dan berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 10 Tahun 2011 telah dibentuk Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakornas P3K) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Ketua Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan dengan anggota Kepala Badan Penyuluhan dan SDM masing-masing Kementerian terkait, Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Anggota tidak tetap yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Bakornas P3K.

Tugas Bakornas P3K yaitu mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mengoptimalisasikan kinerja penyuluhan pada tingkat pusat.

Ketua Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Bakornas P3K. Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas memberi dukungan administrasi kepada Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Pada periode tahun 2016 – 2017 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi *ex officio* dari Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Maksud penyelenggaraan Operasional Tim Pelaksana Sekretariat Bakornas P3K adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Bakornas P3K sehingga mampu mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mengoptimalisasikan kinerja penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyuluhan. Tujuan adalah untuk mendukung administrasi dan pendanaan secara optimal sehingga kinerja Bakornas P3K dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan kesepakatan bahwa sekretariat Bakornas akan dijabat secara bergantian selama 2 tahun oleh 3 kementerian yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan dan Kementerian LHK. Sesuai Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2016, Susunan Keanggotaan Sekretariat Bakornas P3K sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Sekretaris : Kepala Pusat Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Anggota : 1. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kementerian Pertanian
2. Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Asisten Deputi Agribisnis, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Bakornas P3K melaksanakan rapat koordinasi secara berkala yang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Rapat yang telah dilaksanakan yaitu rapat internal tingkat Eselon II sebanyak 2 kali; Rapat Koordinasi terbatas (Rakortas) tingkat Eselon I sebanyak 6 kali; dan Rapat Koordinasi terbatas (Rakortas) tingkat Menteri sebanyak 1 kali, dengan hasil sebagai berikut:

a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- 1) Penyerapan APBN tidak dapat berjalan dikarenakan tidak ada dasar hukumnya, dikarenakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya kementerian Pertanian tidak menyinggung tentang kegiatan Penyuluhan dalam hal kewenangan. Hal ini juga berdampak kepada

penyerapan APBD dimana Bakor/Bapeluh tidak memiliki kewenangan dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan.

- 2) Keberadaan Bakor/Bapeluh (22 Sekretariat Bakorluh Provinsi, 12 campuran dengan Ketahanan Pangan) dan di kab/kota (130 Bapeluh kabupaten dan 378 masih campuran) sangat membantu Pusat dalam proses penyampaian kebijakan dan program kerja serta penyaluran dana Dekon.
- 3) Untuk memberikan kepastian implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 di tingkat daerah, maka diperlukan political will dari pemerintah pusat untuk mempercepat penerbitan peraturan-peraturan pelaksanaannya (PP, Perpres dan Permen), termasuk didalamnya tentang reformulasi kelembagaan penyuluhan di daerah.
- 4) Langkah strategis yang harus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka reformulasi kelembagaan penyuluhan di daerah adalah:
 - a) Mengusulkan reformulasi kelembagaan penyuluhan tingkat provinsi dan kabupaten/kota ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (selaku ketua Badan Koordinasi Nasional) untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut;
 - b) Mengusulkan formasi pengadaan Penyuluh lingkungan hidup dan kehutanan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c) Mengembangkan jabatan fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sekaligus mengadakan pelatihan pembentukan dan pelatihan teknis lainnya;
 - d) Menerbitkan aturan untuk pendayagunaan Penyuluh kehutanan dalam kegiatan penyuluhan lingkungan hidup.
- 5) Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang Penyuluhan Pertanian tidak tercantum dalam lampiran UU tersebut sedangkan Penyuluhan Perikanan hanya tercantum di pusat dan Penyuluh Kehutanan tercantum di Pusat dan Provinsi (sebagai pelaksana).

- 6) Untuk memberikan kepastian implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 di tingkat daerah, maka diperlukan political will dari pemerintah pusat untuk mempercepat penerbitan peraturan-peraturan pelaksanaannya (PP, Perpres, dan Permen). Diharapkan peraturan-peraturan pelaksanaannya tersebut dapat memunculkan kata “kewenangan” sehingga menjadi dasar penyelenggaraan penyuluhan.
- 7) Terkait dengan Pasal 298 ayat 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang hibah dan bantuan sosial (bansos) kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.
- 8) Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang Penyuluhan Pertanian tidak tercantum dalam lampiran UU tersebut sedangkan Penyuluhan Perikanan hanya tercantum di pusat dan Penyuluh Kehutanan tercantum di Pusat dan Provinsi (sebagai pelaksana).

b. Kementerian Pertanian

- 1) Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang Penyuluhan Pertanian tidak tercantum dalam lampiran UU tersebut. Tidak dimaknai bahwa urusan penyuluhan tidak ada di daerah. Tetapi tetap menjadi urusan konkuren (Pasal 15 ayat 2 dan 3) dan ditetapkan dengan Perpres.
- 2) Menteri Pertanian mengusulkan Rancangan Perpres kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penyuluhan Pertanian, serta mengupayakan agar Bidang Penyuluhan Pertanian tercantum dalam Peraturan Pemerintahan tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (POPD)
- 3) Sambil menunggu Perpres, Menteri Pertanian telah berkirim Surat kepada seluruh Gubernur bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006, pada tanggal 5 Januari 2015.
- 4) Ketentuan Pasal 15 diperkuat dengan Pasal 231 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa: “dalam hal ketentuan

peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di daerah, lembaga tersebut dijadikan perangkat daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri (Mendagri) dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendayagunaan Aparatur Negara”.

- 5) Permasalahan Kelembagaan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 harus segera diselesaikan, karena berdasarkan amanat UU harus segera dilaksanakan maksimal 2 tahun setelah UU diterbitkan.
- 6) Serah terima Kepegawaian Penyuluhan dari daerah ke pusat berdasarkan infor dari Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan paling lambat tanggal 20 Oktober 2016.
- 7) Sinkronisasi kelembagaan penyuluhan akan dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan tingkat A1.
- 8) Tidak semua fungsi penyuluhan dapat diletakkan di Dinas, sehingga keberadaan Bakor dan Bapel masih sangat dibutuhkan. Namun keberadaan Bakor dan Bapel harus dibarengi dengan perbaikan manajemen kelembagaan Bakor dan Bapel tersebut.
- 9) Bakorluh dan Bapel tidak bisa dibubarkan selama Perpres No. 54 tentang kelembagaan tingkat daerah belum dicabut. Sehingga seharusnya keberadaan Bakor dan Bapel masih bisa dimanfaatkan.
- 10) Menteri Pertanian mengusulkan Rancangan Perpres kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 27 Agustus 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penyuluhan Pertanian, serta mengupayakan agar Bidang Penyuluhan Pertanian tercantum dalam Peraturan Pemerintahan tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (POPD)
- 11) Sambil menunggu Perpres, Menteri Pertanian telah berkirim Surat kepada seluruh Gubernur bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006, pada tanggal 5 Januari 2015.
- 12) Salah satu program pemerintah “Nawa Cita” disebutkan bahwa, pemerintah harus hadir disetiap denyut nadi masyarakat (penyuluhan).

Namun kenyataan sekarang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 membuat masyarakat menjadi antipati dengan pemerintah.

c. Kementerian Kelautan dan Perikanan

- 1) Penyuluh sebaiknya dipusatkan di masing-masing Provinsi karena jika diserahkan ke Pusat kendalinya akan sulit, selain itu penyuluh juga harus dekat dengan masyarakat sehingga tugas dan fungsi penyuluh tersebut dapat dijalankan.
- 2) Penyuluh Perikanan di daerah cenderung berpendapat pelaksanaan kelembagaan Penyuluhan sebaiknya dilaksanakan di Dinas karena program penyuluhan terdapat di Dinas dan tidak semua Bakor atau Bapel berkomunikasi baik dengan Dinas.

d. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

- 1) Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KLHK selaku sekretaris Bakornas P3K diharapkan bertemu dulu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua Bakornas P3K untuk menyampaikan pokok bahasan pada Rapat Koordinasi Bakornas P3K dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Pokok bahasan yang akan menjadi agenda dalam Rapat Koordinasi Bakornas P3K dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:
 - a) Kesepakatan tentang Kelembagaan (diharmoni substansi Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014)
 - b) Kesepakatan tentang Ketenagaan (pengangkatan pegawai kontrak menjadi ASN) dengan usulan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 10.000 orang, usulan tenaga perikanan sebanyak 2.500 orang, dan usulan tenaga penyuluh Kehutanan sebanyak 1.000 orang.
 - c) Tentang hibah dan bantuan sosial (bansos) kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.



Gambar 17. Rakortas Bakornas P3K tingkat Eselon I tanggal 13 Januari 2016



Gambar 18. Rakortas Bakornas P3K tingkat Eselon I dengan Kementerian Dalam Negeri tanggal 18 Maret 2016



Gambar 19. Rakortas Bakornas P3K tingkat Eselon I dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal



Gambar 20. Rakortas Bakornas P3K tingkat Eselon I dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal

e. Kementerian Dalam Negeri

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan produk 2 rezim pemerintahan.
- 2) UU tidak paten, UU dapat diamandemen. Isi lampiran sebuah UU merupakan masukkan dari Kementerian yang mengusulkan dan bila dalam lampiran UU suatu fungsi (tugas) Kementerian tidak dituangkan secara khusus, maka mengikuti fungsi (tugas) manajemen Kementerian tersebut.
- 3) Kewenangan kelembagaan penyuluhan diharapkan di tingkat Provinsi, karena kelembagaan dibentuk berdasarkan dari urusan-urusan yang terdapat di Provinsi tersebut.
- 4) Polivalen tugas penyuluhan merupakan hal yang bagus.

- 5) Terkait hibah dan bantuan sosial (bansos) kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sedang didiskusikan ulang di Kementerian Dalam Negeri.
- 6) Sebagai informasi Peraturan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sedang di susun.

Pagu anggaran kegiatan Bakornas P3K sebesar Rp. 238.400.000,- terealisasi keuangan Rp. 236.931.630,- atau 99,38% dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

9. Pertemuan Forum dan Pemetaan Penyuluh Non Aparatur

Keberadaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) di Indonesia yang saat ini berjumlah 4.796 orang, sedangkan jumlah Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS) masih sangat sedikit, walaupun demikian sesungguhnya banyak karyawan perusahaan bidang kehutanan yang telah berperan sebagai penyuluh kehutanan. Data Ganis Binhut dari BP2HP diseluruh Indonesia tahun 2016 terdapat 327 orang PKS yang telah berperan dalam kegiatan penyuluhan.

Pada tahun 2016, Pusat Penyuluhan melaksanakan pertemuan Forum Penyuluh Kehutanan Swasta Nasional (FPKSN) dan Pemetaan data Penyuluh Non Aparatur (PKSM dan PKS) sebagai berikut:

a. Pertemuan Forum Penyuluh Non Aparatur

Pertemuan FPKSN dilaksanakan tanggal 28-30 November 2016, bertempat di Padjadjaran Suites Hotel, Jl. Raya Pajajaran No. 17 Kota Bogor. Peserta Pertemuan FPKSN adalah pengurus FPKSN yang terdiri dari Penyuluh Kehutanan Swasta yang berasal dari Perum Perhutani dan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan. Adapun susunan acara Pertemuan forum penyuluh kehutanan swasta nasional (FPKSN) :

Waktu	Judul Materi	Narasumber/ Petugas
1	2	3
== Hari Pertama tanggal 28 November 2016 ==		
10.00-13.00	Registrasi Peserta	Panitia
13.00-14.00	Pembukaan serta Pengarahan oleh Kepala Pusat Penyuluhan	Kepala Pusat Penyuluhan
14.00-15.00	Peran PKS dalam meningkatkan eksistensi dan peran profesi Penyuluh Kehutanan dalam	Kepala Bidang Ketenagaan

Waktu	Judul Materi	Narasumber/ Petugas
1	2	3
	mendukung pembangunan LHK	Penyuluhan
15.00-15.15	C O F F E E B R E A K	
15.15-17.15	Pleno I Pembahasan Anggaran Dasar Forum PKS N (Diskusi Panel)	Ketua Forum PKS N
17.15-19.00	R E H A T & S H O L A T	
19.00-21.00	Pleno II Pembahasan Anggaran Rumah Tangga Forum PKS N (Diskusi Panel)	Ketua Forum PKS N
== Hari Kedua tanggal 29 November 2016 ==		
08.00-10.00	Pembahasan Redaksi Anggaran Dasar Forum PKS N (Diskusi Panel)	Penyuluh Kehutanan Ahli dan Ketua Forum PKS N
10.00-10.15	C O F F E E B R E A K	
10.15-11.45	Pembahasan Redaksi Anggaran Rumah Tangga Forum PKS N (Diskusi Panel)	Penyuluh Kehutanan Ahli dan Ketua Forum PKS N
11.45-13.00	R E H A T & S H O L A T	
13.00-15.00	Pembahasan Rencana Kerja Jangka Panjang Forum PKS N (Diskusi Panel)	Ketua Forum PKS N
15.00-15.15	C O F F E E B R E A K	
15.15-17.45	Pembahasan Rencana Kerja Jangka Pendek Forum PKS N (Diskusi Panel)	Ketua Forum PKS N
== Hari Ketiga tanggal 30 November 2016 ==		
08.00-10.00	Finalisasi dan Persentasi AD/ART serta Program Kerja Jangka Panjang dan Jangka Panjang Forum PKS N	Kepala Bidang Ketenagaan Penyuluhan
10.00-11.00	Penutupan	Panitia
11.00-12.00	Penyelesaian Administrasi	Panitia

Hasil dari pertemuan FPKSN adalah:

- 1) Tersusunnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan rencana kerja FPKSN.
- 2) Terwujudnya kelembagaan Penyuluh Kehutanan Swasta yang baik sehingga dapat mendukung kegiatan pembangunan kehutanan.



Gambar 21. Pertemuan Forum FPKSN

b. Pemetaan SDM Penyuluh Non Aparatur

Maksud dari kegiatan Pemetaan SDM Penyuluh Non Aparatur adalah mengidentifikasi dan memetakan PKSM dan PKS dalam hal jumlah tenaga, sebaran, aktifitas dan kegiatan serta, kemampuan dan keterampilan masing - masing penyuluh yang telah melaksanakan kegiatan pembangunan kehutanan. Tujuannya adalah mendapatkan data dan informasi SDM penyuluh non aparatur yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hasil pemetaan SDM non aparatur adalah sebagai berikut:

1. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)

- a. Jumlah data PKSM yang masuk ke sekretariat pendataan PKSM sampai dengan akhir Desember 2016 adalah sebanyak 2.702 orang dengan sebaran data PKSM berdasarkan Provinsi sebagaimana tabel 5.

Tabel 5. Sebaran data Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) masing-masing Provinsi

No	Provinsi	Jumlah data	No	Provinsi	Jumlah data
1	Bali	132	16	Maluku	1
2	Bangka Belitung	5	17	Maluku Utara	3
3	Banten	79	18	NAD	101
4	Bengkulu	174	19	NTB	92
5	D.I. Yogyakarta	5	20	NTT	2
6	Gorontalo	3	21	Papua	2
7	Jambi	23	22	Riau	98
8	Jawa Barat	721	23	Sulawesi Barat	104
9	Jawa Tengah	215	24	Sulawesi Selatan	80
10	Jawa Timur	274	25	Sulawesi Tengah	108
11	Kalimantan Barat	110	26	Sulawesi Tenggara	68
12	Kalimantan Selatan	58	27	Sulawesi Utara	26
13	Kalimantan Tengah	17	28	Sumatera Barat	47
14	Kalimantan Timur	1	29	Sumatera Selatan	84
15	Lampung	55	30	Sumatera Utara	14
				Jumlah	2.702

Bagi PKSM yang sudah memenuhi persyaratan berjumlah 1.113 orang dan telah diberikan kartu identitas oleh BP2SDM melalui Pusat Penyuluhan, dengan contoh kartu identitas PKSM sebagaimana gambar 22.



Gambar 22. Kartu Anggota PKSM

Bagi PKSM yang belum memenuhi syarat sejumlah 1.589 orang, sehingga kartu identitas PKSM tidak dapat dicetak dan diharapkan dapat segera melengkapi data yang diperlukan, serta dikirim kepada Pusat Penyuluhan.

b. Persentase aktivitas PKSM di lapangan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan kehutanan dan pendampingan kelompok tani hutan (12,56%)
- 2) Hutan rakyat dan Hutan tanaman rakyat (32,19%)
- 3) Agroforestry (13,21%)
- 4) Rehabilitasi hutan dan lahan (penghijauan lingkungan, Gerhan) (13,06%)
- 5) Hasil hutan bukan kayu (Lebah madu, gula aren, jamur tiram, bambu) (10,10%)
- 6) Pembibitan (Persemaian dan Kebun bibit rakyat) (15,57%)
- 7) Pemanfaatan lahan bawah tegakan (PLBTH) (1,56%)
- 8) Budidaya gaharu (1,76%)

2. Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS)

Data Tenaga Penyuluh Kehutanan Swasta sampai dengan desember 2016 berjumlah 441 orang yang tersebar di 17 provinsi, dan 125

perusahaan/divisi regional. Data secara rinci sebagaimana Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Data Penyuluh Kehutanan Swasta berdasarkan Perusahaan

No.	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH PKS			Provinsi
		L	P	Jumlah	
1	PERUM PERHUTANI DIVRE JAWA TIMUR	14	1	15	Jawa Timur
2	PERUM PERHUTANI DIVRE JAWA TENGAH	16		16	Jawa Tengah
3	PERUM PERHUTANI DIVREJAWA BARAT/BANTEN	20		20	Jawa Barat
4	PT. INHUTANI I	2		2	Jakarta
5	PT. INHUTANI II	9	1	10	Jakarta
6	PT. INHUTANI III	3		3	Kalimantan Selatan
7	PT. INHUTANI IV	2		2	Jakarta
8	PT. HUTAN RINDANG BANUA	2		2	Kalimantan Selatan
10	PT. Toba Pulp Lestari Tbk	15		15	Sumatera Utara
11	PT. TRIKORINDOTAMA WANAKARYA	1		1	Kalimantan Selatan
12	CV. Pangkar Pegili	1		1	Kalimantan Barat
13	CV. Pangkar Pegili	1		1	Kalimantan Barat
14	KOP MAJU TERUS JAYA	1		1	Kalimantan Selatan
15	Kop. Wailo Wanalestari	1		1	Maluku
16	KOPERASI AKAR PERJUANGAN	2		2	Kalimantan Selatan
17	KOPERASI GEMAH RIPAH	1		1	Kalimantan Selatan
18	KOPERASI KSU SENGON AGUNG BERSAMA	1		1	Jawa Timur
19	KPM KUNTUM MELATI	2		2	Kalimantan Selatan
20	KSU JASA MANDIRI	2		2	Kalimantan Selatan
21	KUD BERSAMA KITA MEMBANGUN	4		4	Kalimantan Selatan
22	PD. Panca Karya	3		3	Maluku
23	PK. KARYA ABADI LAMPUNG	1		1	Lampung
24	PT Sari Bumi Kusuma	1		1	Kalimantan Barat
25	PT SEBUKU IRON LATRTIC ORES	1		1	Kalimantan Selatan
26	PT TIMBERDANA		1	1	Kalimantan Timur
112	PT. Aceh Indrapuri	1		1	NAD
27	PT. Agro Wahana Bumi	1		1	Jakarta
28	PT. Agronusa Alam Sejahtera	3		3	Jambi
29	PT. Alam Lestari Nusantara	2		2	Jambi
30	PT. ALAS KUSUMA GROUP	1		1	Kalimantan Barat
31	PT. Albasi Priangan Lestari	1		1	Maluku
32	PT. Aneka Tambang	1		1	Maluku
33	PT. Anugrah Rimba Makmur	1		1	Sumatera Utara
34	PT. Arangan Hutani Lestari	1		1	Jambi
35	PT. ARARA ABADI	3		3	Riau

No.	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH PKS			Provinsi
		L	P	Jumlah	
36	PT. Asia Tani Persada	3		3	Kalimantan Barat
37	PT. AYA YAYANG INDONESIA	6	2	8	Kalimantan Selatan
38	PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES	1		1	Kalimantan Timur
39	PT. Bina Ovipari Semesta	2		2	Kalimantan Barat
40	PT. Bina Silva Nusa	2		2	Kalimantan Barat
41	PT. Borneo Karunia Mandiri	1		1	Kalimantan Barat
42	PT. Bumi Andalas Permai	14		14	Sumatera Selatan
43	PT. Bumi Mekar Hijau	19		19	Sumatera Selatan
44	PT. Bumi Persada Permai	4		4	Sumatera Selatan
45	PT. Bumi Persada Permai II	4		4	Sumatera Selatan
46	PT. Daya Tani kalbar	1		1	Kalimantan Barat
47	PT. DWIMA INTIGA	1		1	Kalimantan Selatan
48	PT. ELBANA ABADI JAYA	2		2	Kalimantan Selatan
49	PT. Fimantara Intiga	5		5	Kalimantan Barat
50	PT. FORTUNA Cipta Sejahtera	1		1	Kalimantan Tengah
51	PT. Gema Hutani Lestari	10		10	Maluku
52	PT. Gorontalo Citra Lestari	1		1	Gorontalo
53	PT. GRUTI	3		3	Sumatera Utara
54	PT. GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER INDUSTRIES	1		1	Kalimantan Timur
55	PT. Harapan Kita Utama	2		2	Kalimantan Barat
56	PT. HASNUR JAYA UTAMA	2		2	Kalimantan Selatan
57	PT. Hutan Barumon Perkasa	2		2	Sumatera Utara
58	PT. Hutan Ketapang Industri		1	1	Kalimantan Barat
59	PT. HUTAN RINDANG BANUA	6		6	Kalimantan Selatan
60	PT. HUTAN SEMBADA	1	1	2	Kalimantan Selatan
61	PT. Jebus Maju	1		1	Jambi
62	PT. JENGGALA SEMESTA	1		1	Kalimantan Selatan
63	PT. JHONLIN AGROMANDIRI	3		3	Kalimantan Selatan
64	PT. Kalimantan Setya Kencana	2	1	3	Kalimantan Barat
65	PT. Kalimantan Subur Permai	2		2	Kalimantan Barat
66	PT. Kandelina Alam	1		1	Kalimantan Barat
67	PT. Karya Jaya Berdikari	2		2	Maluku
68	PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER	1		1	Kalimantan Timur
69	PT. KIRANA CHATULISTIWA	1		1	Kalimantan Selatan
70	PT. KODECO TIMBER	3		3	Kalimantan Selatan
71	PT. LESTARI ASRI JAYA	5		5	Jambi
72	PT. Mahkota Rimba Utama	1		1	Kalimantan Barat
73	PT. Malaka Agro Perkasa	2		2	Jambi
74	PT. Maluku Sentosa	1		1	Maluku
75	PT. Mayangkara Tanaman Industri	7		7	Kalimantan Barat

No.	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH PKS			Provinsi
		L	P	Jumlah	
76	PT. Meranti Lestari	1		1	Kalimantan Barat
77	PT. Mitra Jaya Nursaidah	0	1	1	Kalimantan Barat
78	PT. Mohtra Agung Persada	1		1	Maluku
79	PT. Muara Sungai Landak	1		1	Kalimantan Barat
80	PT. Mukti Wisesa	2		2	Jambi
81	PT. MULTISTRADA AGRO INTERNASIONAL		1	1	Kalimantan Timur
82	PT. MUSI HUTAN PERSADA	5		5	Sumatera Selatan
83	PT. Nusa Halmahera Mineral	3		3	Maluku
84	PT. Nusapadma Corp	1		1	Maluku
85	PT. Panel Lika Sejahtera	2		2	Sumatera Utara
86	PT. Pesona Belantar Persada	2		2	Jambi
87	PT. Poleko Yubarsons	1		1	Maluku
88	PT. PRIMA MULTI BUANA	2		2	Kalimantan Selatan
89	PT. Putra Lika Perkasa	3		3	Sumatera Utara
90	PT. Putraduta Indah Wood	2		2	Jambi
91	PT. Reminal Utama Sakti	1		1	Maluku
92	PT. Restorasi Ekosistem Indonesia	6		6	Jambi
93	PT. RIAU ANDALAN PULP DAN PAPER	23	1	24	Riau
94	PT. Rimba Hutani Mas	11		11	Jambi
95	PT. Samhutani	1		1	Jambi
96	PT. Sari Bumi Kusuma	2		2	Kalimantan Barat
97	PT. SBA Wood Industries	15		15	Sumatera Selatan
98	PT. SETYAMITRA BHAKTI PERSADA	5		5	DIY
99	PT. Sinar Belantara Indah	1		1	Sumatera Utara
100	PT. SINDO LUMBER	1		1	Kalimantan Tengah
101	PT. Sinergi Bumi Lestari	1		1	Kalimantan Barat
102	PT. Sipef Biodiversity Indonesia	1		1	Lampung
103	PT. SK NETWORK INNI JOA PANT	3		3	Kalimantan Selatan
104	PT. Suka Jaya Makmur	7		7	Kalimantan Barat
105	PT. Sumalindo Hutani Jaya	3		3	Kalimantan Timur
106	PT. Sumatera Riang Lestari	9		9	Sumatera Utara
107	PT. Sumatera Sylva Lestari	2		2	Sumatera Utara
108	PT. Sumber Hijau Permai	4		4	Sumatera Selatan
109	PT. Surya Kirana Dutamas	2		2	Maluku
111	PT. Tebo Multi Agro	5		5	Jambi
112	PT. Telaga Bakti Persada	3		3	Maluku
113	PT. Teluk Nauli	2		2	Sumatera Utara
114	PT. TIMBERDANA	1		1	Kalimantan Timur
115	PT. Tri Pupajaya	1		1	Sumatera Selatan
116	PT. TUNAS TIMBER LESTARI		1	1	Kalimantan Timur

No.	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH PKS			Provinsi
		L	P	Jumlah	
117	PT. TUNGGAL RAYA UTAMA TIMBER INDUSTRIES	1		1	Riau
118	PT. Wana Hijau Pasaguan	10		10	Kalimantan Barat
119	PT. Wana Mukti Wisesa	1		1	Jambi
120	PT. Wana Perintis	3		3	Jambi
121	PT. Wana Subur Lestari	4		4	Kalimantan Barat
122	PT. Wanasokan Hasilindo	2		2	Kalimantan Barat
123	PT. Weda Bay Nickel	1		1	Maluku
124	PT. Wira Karya Sakti	22		22	Jambi
125	PT. WIRAKARYA SAKTI SINARMAS FORESTRY	1		1	Riau
	Jumlah	429	12	441	

Pagu anggaran kegiatan Pertemuan Forum dan Pemetaan Penyuluh Non Aparatur adalah sebesar Rp 110.650.000,- terealisasi keuangan Rp 110.331.276,- atau 99,71% dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

10. Penyelenggaraan Lomba Wana Lestari Tahun 2016

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dan aparat pemerintah dalam pembangunan kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahun menyelenggarakan Lomba Wana Lestari sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari.

Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Wana Lestari dimaksudkan untuk mengetahui dan menetapkan perorangan, kelompok atau aparat pemerintah yang berprestasi dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan melalui mekanisme penilaian tertentu. Adapun tujuannya yaitu memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau aparat pemerintah yang telah berperan aktif dan peduli dalam berbagai kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Lomba dan Apresiasi Wana Lestari diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Lomba dan Apresiasi Wana Lestari dilaksanakan secara sederhana, berupa pemberian penghargaan untuk meningkatkan prestasi aparat pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan kehutanan.
- b. Hal yang dinilai dalam Lomba dan Apresiasi Wana Lestari adalah keberhasilan peserta dalam bidang :
 - 1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
 - 2) Konservasi Sumberdaya Alam
 - 3) Perlindungan dan Pengamanan Hutan
 - 4) Pemberdayaan masyarakat didalam maupun sekitar hutan
- c. Instansi Penanggung Jawab lomba dan apresiasi yaitu :
 - 1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 - 2) Direktorat Jenderal PSKL
 - 3) Direktorat Jenderal KSDAE
 - 4) Direktorat Jenderal PPI
 - 5) Direktorat Jenderal GAKUM
 - 6) Direktorat Jenderal PHPL

Adapun kategori dan masing-masing penanggungjawab lomba dan apresiasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kategori Lomba
 - 1) Penyuluh Kehutanan PNS (BP2SDM)
 - 2) Kelompok Tani Hutan (BP2SDM)
 - 3) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (BP2SDM)
 - 4) Kader Konservasi Alam (Ditjen PSKL)
 - 5) Kelompok Pecinta Alam (Ditjen PSKL)
 - 6) Kelompok Masyarakat Pemegang Izin HKm (Ditjen PSKL)
 - 7) Pengelola Hutan Desa (Ditjen PSKL)
- b. Kategori apresiasi
 - 1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (Ditjen KSDAE)
 - 2) Polisi Kehutanan (Ditjen GAKUM)
 - 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ditjen GAKUM)
 - 4) Manggala Agni (Ditjen PPI)

- 5) Masyarakat Peduli Api (Ditjen PPI)
- 6) Pengelola Hutan Adat (Ditjen PSKL)

Kegiatan Penilaian Lomba Wana Lestari secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Tim Penilai Tingkat Nasional bertugas melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap hasil penilaian pemenang lomba tingkat provinsi dan usulan pemenang dari Eselon I terkait untuk setiap kategori. Klarifikasi dan verifikasi dilakukan dengan cara pengecekan dokumen administrasi, wawancara dan/atau pengecekan kegiatan di lapangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar tim penilai untuk menentukan sepuluh peringkat terbaik. Hasil pemeringkatan sepuluh peringkat terbaik diajukan tim penilai kepada tim pakar yang bertugas melakukan sidang untuk menetapkan nominasi pemenang lomba wana lestari tingkat nasional (Terbaik I s/d II dan Harapan I s/d III). Nominasi pemenang sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada tim pakar kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM untuk kemudian diusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 23. Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Barat

Pada Tahun 2016, Tim Pakar Lomba Wana Lestari dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 566/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Tim Pakar Lomba Wana Lestari Tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016, Tim Pakar terdiri dari :

Ketua : Dr. Ir. Harry Santoso

Anggota :

1. Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS
2. Ir. Bagus Herudojo, MP
3. Drs. Maman Suparman
4. Dahniar Andriani

Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian LHK kepada para pemenang lomba Wana Lestari dan apresiasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenang Lomba tingkat nasional terbaik I s/d III sampai harapan I s/d III masing-masing kategori akan memperoleh :
 - a. Piagam penghargaan;
 - b. Plakat;
 - c. Piala; dan
 - d. Penghargaan lain yang dianggap sah.
- 2) Pemenang pertama lomba setiap kategori tingkat provinsi yang tidak ditetapkan sebagai pemenang tingkat nasional berhak menerima penghargaan dari Pemerintah berupa :
 - a. Piagam penghargaan;
 - b. Penghargaan lain yang dianggap sah.
- 3) Penerima apresiasi berhak menerima penghargaan berupa :
 - a. Piagam penghargaan;
 - b. Plakat; dan
 - c. Penghargaan lain yang dianggap sah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.634/MENLHK/P2SDM/SDM.0/8/2016 tanggal 11 Agustus 2016 ditetapkan Penerima Penghargaan Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2016 dengan kategori dan juara sebagai berikut:

a. Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tahun 2016

1) Penyuluh Kehutanan PNS

No Urut	Nama/NIP	Instansi	Provinsi	Keterangan
1.	I Gede Sutresna, SP	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem	Bali	Terbaik I
2.	Dewi Sulistyowati, SP	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Sleman	D.I. Yogyakarta	Terbaik II
3.	Loso Riyanto, STP	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kebumen	Jawa Tengah	Terbaik III
4.	Agus Kuswandi, A.Md	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Bandung	Jawa Barat	Harapan I
5.	Mada Rusli, SST	Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	Harapan II
6.	Irene Christine Mandang, S.Hut	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Minahasa Tenggara	Sulawesi Utara	Harapan III

2) Kelompok Tani Hutan

No Urut	Nama Kelompok	Alamat	Provinsi	Keterangan
1.	KTH Giri Senang (Asep Rohman)	Kampung Legok Nyenang Desa Girimekar Kec. Cilengkrang Kab. Bandung	Jawa Barat	Terbaik I
2.	KTH Mutiara Hijau I (Samsudin)	Purworejo Kec. P Sakti Kab. Lampung Timur	Lampung	Terbaik II
3.	KMPHP Mangrove Sari (Rusjan)	Dukuh Pandan Sari Desa Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes	Jawa Tengah	Terbaik III
4.	KTH Mudhotomo (Supari)	Pedukuhan Banyuganti Desa Jati Mulyo Kec. Giri Mulyo Kab. Kulonprogo	D.I. Yogyakarta	Harapan I
5.	KTH Karya Bakti Melanting (I Wayan Bandem, SH)	Banjardinas Telenggan Desa Gegelan Kec. Manggis Kab. Karangasem	Bali	Harapan II
6.	KTH Tani Beru (Sanne)	Desa Juluma'tene Kec. Bontolempangan Kab. Gowa	Sulawesi Selatan	Harapan III

3) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)

No Urut	Nama	Alamat	Provinsi	Keterangan
1.	Sukamsi SH, MH	Desa Karang Duwur Kec. Ayah Kab. Kebumen	Jawa Tengah	Terbaik I
2.	I Gede Partadana SH	Desa Bebandem Kec. Bebandem Kab. Karangasam	Bali	Terbaik II
3.	Sugeng Apriyanto	Desa Katongan Ngerendu Kec. Nglipar Kab. Gunung Kidul	D.I. Yogyakarta	Terbaik III

No Urut	Nama	Alamat	Provinsi	Keterangan
4.	Meidy Umboh	Desa Talawan Kec. Talawan Kab. Minahasa Utara	Sulawesi Utara	Harapan I
5.	Matheus Warnares	Desa Sunde Kec. Biak Timur Kab. Biak Numfor	Papua	Harapan II
6.	Raden Mardi	Desa Jenggala Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara	NTB	Harapan III

4) Kader Konservasi Alam (KKA)

No Urut	Nama	Alamat	Instansi Pembina	Provinsi	Ket.
1.	Mukidin	Desa Ngrancah Kec. Grabag Kab. Magelang	BKSDA Jawa Tengah	Jawa Tengah	Terbaik I
2.	Ir. Dian Rossana Anggraini	Jl. Diponegoro No. 59 Bukit Betung Sungailiat Bangka	BKSDA Bangka Belitung	Kep. Bangka Belitung	Terbaik II
3.	Ichvan Sofyan	Hargomulyo RT01 RW 01 No. 25 Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur	BKSDA Lampung	Lampung	Terbaik III
4.	Suratimin	Desa Kawasan Konservasi Semoyo Kec. Patuk Kab. Gunung Kidul	BKSDA D.I Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	Harapan I

5) Kelompok Pecinta Alam (KPA)

No Urut	Nama Kelompok	Alamat	Instansi Pembina	Provinsi	Ket.
1.	LAWALATA-IPB	Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Lt. 1, Jl. Agatis I Kampus IPB Dramaga Bogor	BBKSDA Jawa Barat	Jawa Barat	Terbaik I
2.	OPA KOMANGJO	Rumah Mangrove Kelurahan Pangen Juru Tengah RT 01/03 Kec. Purworejo Kab. Purworejo	BKSDA Jawa Tengah	Jawa Tengah	Terbaik II
3.	Animal Lovers of Bangka Island (ALOB I)	Jl. Sumedang RT.01 RW 02 kel. Kejaksaan Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang	BKSDA Bangka Belitung	Kep. Bangka Belitung	Terbaik III
4.	MATALABIOGA MA	Fakultas Biologi UGM Yogyakarta UGM Yogyakarta, Jl. Teknika Selatan Sekip Utara Yogyakarta	BKSDA DI Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	Harapan I
5.	ALGAPALA	Jl. MH. Thamrin No. 29 D Kota Bau-Bau	BKSDA Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	Harapan II

7) Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

No Urut	Nama Kelompok	Alamat	Provinsi	Keterangan
1.	HKm Beringin Jaya	Desa Margoyoso Kec. Sumber Rejo Kab. Tanggamus	Lampung	Terbaik I
2.	HKm Maju Bersama	Desa Santon Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara	NTB	Terbaik II
3.	HKm Mapahi	Desa Mapahi Kec. Pipikoro Kab. Sigi	Sulawesi Tengah	Terbaik III

8) Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)

No Urut	Nama Kelompok	Alamat	Provinsi	Keterangan
1.	LPHN Jorong Simancuang	Desa Alam Pauh Duo Kec. Pauh Duo Kab. Solok Selatan	Sumatera Barat	Terbaik I
2.	LPHD Kerima Puri	Desa Merabu Kec. Kelay Kab. Berau	Kalimantan Timur	Terbaik II
3.	LPHD Tibussan	Desa Tibussan Kec. Latimojong Kab. Luwu	Sulawesi Selatan	Terbaik III
4.	PLHD Mentan Kapuas	Desa Ujung Said Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	Harapan I
5.	Bumdes Pandan Harum	Desa Selat Kec. Sukasada Kab. Buleleng	Bali	Harapan II
6.	LPHD Gohong	Desa Gohong Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	Harapan III

b. Penerima Penghargaan Lomba Wana Lestari Tahun 2016

1) POLISI KEHUTANAN (POLHUT)

No	Nama/ NIP	Instansi
1	2	3
1.	SUGIYONO / 19620912 199803 1 001	Bagian Daerah Hutan Paliyan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Prov. D.I. Yogyakarta
2.	SUHANTON / 19831008 200604 1 001	Balai Taman Nasional Karimunjawa Prov. Jawa Tengah
3.	JONSAH PUTRA BAKTI / 19831102 200710 1 002	Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Prov. Nangroe Aceh Darussalam

2) PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

No	Nama/ NIP	Instansi
1	2	3
1.	HARI NOVIANTO, S.SOS / 19751110 200003 1 002	Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Kalimantan Seksi Wilayah III Prov. Kalimantan Barat
2.	BAHRUL HELMI, SH / 19781010 199903 1 003	Dinas Kehutanan Prov. NTB
3.	SAIDI NUR / 19630617 199003 1 002	Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Prov. Nangroe Aceh Darussalam

3) MANGGALA AGNI

No	Nama	Instansi
1	2	3
1.	ANDREAN	Daops Rengat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Prov. Riau
2.	VICTORIO MONTE CARLO	Daops Ogan Komering Ilir Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prov. Sumatera Selatan
3.	LEONARDUS RIDWAN	Daops Singkawang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prov. Kalimantan Barat

4) MASYARAKAT PEDULI API (MPA)

No	Nama	Alamat
1	2	3
1.	EDY SAPRI	MPA Desa Rasau Jaya, Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat
2.	SETIONO	MPA Desa Rawa Mekar Jaya, Kec. Sungai Apit Kab. Siak Prov. Riau
3.	ABDULLAH	MPA Setia Sehati Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sebangau, Kota Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah

5) PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIA JASA WISATA ALAM LINGKUNGAN DI KAWASAN KONSERVASI

No	Nama Pemegang Izin	Kawasan Konservasi
1	2	3
1.	MARTA ATMAJA	Taman Nasional Gunung Ciremai Kab. Kuningan Prov. Jawa Barat
2.	SUGIYONO	Taman Wisata Alam Telaga Warna Telaga Pengilon Kab. Wonosobo Prov. Jawa Tengah
3.	KOPERASI SERBA USAHA (KSU) TAMAN NASIONAL KOMODO	Taman Nasional Komodo Kab. Labuan Bajo Prov. NTT

6) PENGELOLA HUTAN ADAT

No	Nama Hutan Adat	Alamat
1	2	3
1.	AMATOA KAJANG	Desa Tanah Towa, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan
2.	TAU TAU WANA POSANGKE	Lipu Wana Posangke, Kec. Bungku Utara, Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah
3.	SERAMPAS	Desa Rantau Kermas, Kec. Jangkat, Kab. Merangin, Prov. Jambi
4.	WEHEA	Kec. Wahau, Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur

Biaya penyelenggaraan Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2016 bersumber dari DIPA Tahun 2016 Satker Pusat Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dianggarkan sebesar Rp 1.063.099.000,-. Sedangkan untuk realisasinya terserap sebesar Rp 1.060.261.026,- atau sekitar 99,73% dari RAB.

11. Penyelenggaraan Temu Karya Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2016

Maksud penyelenggaraan Temu Karya Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari adalah sebagai media bagi para pemenang lomba untuk saling bertukar informasi dan pengalaman dalam melaksanakan pembangunan kehutanan, serta sebagai sarana membangun jejaring kerja antar sesama peserta. Rangkaian kegiatan lomba dan Temu Karya ini merupakan salah satu metoda penyuluhan yang diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Output :

1. Terselenggaranya pemberian penghargaan kepada pemenang lomba dan penerima apresiasi Wana Lestari Tahun 2016.
2. Terbentuknya jejaring kerja diantara para pemenang lomba dan penerima apresiasi.
3. Terwujudnya peningkatan motivasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Outcome : meningkatnya dampak yang diberikan oleh para pemenang lomba kepada masyarakat luas berupa peningkatan peran aktif mereka dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Temu Karya Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2016 diselenggarakan pada tanggal 15 s/d 19 Agustus 2016 di Orchardz Hotel, Jl. Industri Raya No.8 Gunung Sahari –Jakarta Pusat. Pada Temu Karya Tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundang 87 orang teladan yang terdiri dari Juara I – III dan Harapan I – III dari 7 (tujuh) kategori lomba (no. 1 s/d. 15), serta 3 penerima dari 6 (enam) kategori apresiasi (no. 16 s/d. 20) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kategori Lomba

- a. Penyuluh Kehutanan PNS : 6 orang
- b. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat : 6 orang
- c. Kelompok Tani Hutan : 6 orang
- d. Kader Konservasi Alam (KKA) : 4 orang
- e. Kelompok Pecinta Alam (KPA) : 5 orang
- f. Kelompok Masyarakat Pemegang Izin HKm : 3 orang
- g. Pemegang Hutan Desa : 6 orang

2. Kategori Apresiasi

- a. Pemegang IUPJWA di Kawasan Konservasi : 6 orang
- b. Polisi Kehutanan : 3 orang
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil : 3 orang
- d. Manggala Agni : 3 orang
- e. Masyarakat Peduli Api : 3 orang
- f. Pengelola Hutan Adat : 4 orang

Tema Temu Karya Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2016 adalah “Partisipasi Aktif Masyarakat Kunci Keberhasilan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan”. Adapun rangkaian acara kegiatan Temu Karya Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) Pembukaan Temu Karya

Pembukaan Temu Karya direncanakan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) pada tanggal 15 Agustus 2016, yang akan didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam.



Gambar 24. Pembukaan Temu Karya oleh Kepala Badan P2SDM

2) Menghadiri Sidang Paripurna DPR RI

Guna menambah wawasan dan pengalaman, peserta Temu Karya berkesempatan untuk menghadiri Sidang Paripurna DPR RI yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2016.

3) Pemberian Penghargaan dan Temu Wicara dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Temu wicara dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2016. Temu wicara ini merupakan media untuk berdialog langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada acara tersebut juga akan dilakukan pemberian penghargaan kepada Terbaik Nasional I, II, III, dan Harapan I, II dan III Lomba Wana Lestari, pemberian apresiasi bagi Calon Pengelola Hutan Adat, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pemegang Ijin Usaha Pengelolaan Jasa Wisata Alam tahun 2016 serta para pihak yang berperan aktif di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.



Gambar 25. Temu Wicara Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Gambar 26. Pemberian Penghargaan kepada Juara Nasional Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2016

4) Mengikuti Rangkaian Acara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-71

Guna meningkatkan rasa bangga atas prestasi yang telah dicapai dalam kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan peserta Temu Karya/Sarasehan berkesempatan untuk mengikuti rangkaian Acara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71 Tanggal 17 Agustus 2016 di Istana Negara dengan diikuti sebanyak 9 (sembilan) orang juara 1 lomba Wana Lestari .

5) Rekreasi

Sebagai wahana penambah wawasan peserta dan memupuk rasa cinta terhadap Tanah Air Indonesia. Peserta akan mengunjungi Gelanggang Samudra Ancol pada tanggal 17 Agustus 2016.



Gambar 27. Rekreasi ke Gelanggang Samudera, Ancol - Jakarta

6) Ramah Tamah dengan Presiden RI

Tanggal 18 Agustus 2016 mengikuti Acara Ramah Tamah dengan Presiden RI di Istana Bogor.

7) Temu Karya/Sarasehan

Kegiatan ini merupakan forum pertukaran informasi dan pengalaman serta membangun jejaring kerja diantara peserta. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2016.



Gambar 28. Sharing antar peserta Temu Karya Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2016

Hasil sarasehan/Temu karya peserta lomba dengan eselon I terkait sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM bagi aparat, masyarakat dan pelaku usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Peningkatan kerjasama KemenLHK dengan multipihak;
3. Pemantapan dan penguatan kelembagaan masyarakat di tingkat tapak serta penguatan organisasi profesi penyuluh kehutanan (IPKINDO).
4. Penguatan sistem pengamanan dan penegakan hukum, dengan menjadikan Polhut dan PPNS satu komando, sesuai dengan Tupoksi dari Dirjen Gakkum sebagai garda terdepan dalam pengamanan dan penegakan hukum;
5. Mereview Undang-undang No.18 th 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), yang belum secara tegas mengatur pidana perusakan hutan lainnya dan Permenhut No.21 tahun 2015 tentang PUH hak milik agar ditinjau kembali kewenangan menerbitkan dokumen seperti (SKAU);

6. Kepastian status Manggala Agni dan jaminan kesehatan;
7. Masyarakat Peduli Api (MPA) berperan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB);
8. Revisi dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penenerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada KemenLHK terkait dengan retribusi berganda wisata alam di kawasan konservasi antara pengelola Taman Nasional dengan Pemerintah Daerah terkait;
9. KemenLHK mendorong Pemda agar segera menetapkan PERDA tentang pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA).
10. MHA dapat menjadi Pengelola Hutan Desa (PHD), Hutan Hak, pengelola HKm, dan pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).
11. Inventarisasi keberadaan penyuluh yang wilayah kerjanya berada pada area kerja HKm/HD.
12. Gubernur bisa menerbitkan IUPHKmnya bagi lokasi-lokasi HKm yang belum diterbitkan izinnya sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014;
13. Kewenangan pembinaan masyarakat pengelola kawasan hutan agar tetap di berikan kepada pemerintah daerah kabupaten.
14. Dukungan pendanaan dari pemerintah atau lembaga donor lainnya bagi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) untuk pengelolaan Hutan Desa.
15. Mendorong lembaga desa agar melakukan penataan batas partisipatif untuk menjamin kepastian wilayah kelola HD.
16. KKA dan KPA senantiasa menjadi pelaku utama dalam peningkatan peran serta masyarakat di dalam perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan.
17. Terobosan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan KPA agar dapat menunjang kegiatannya, antara lain pengembangan kebun botani, pelatihan yang berkelanjutan untuk generasi muda dan masyarakat, pembuatan bahan publikasi konservasi plasma nutfah dan adopsi pohon.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 2.014.267.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.012.996.026,- atau sekitar 99,94%, serta realisasi capaian fisik sebesar 100%.

12. Pengembangan Materi Penyuluhan

Pengembangan materi Penyuluhan dilaksanakan mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan.

Maksud pelaksanaan kegiatan pengembangan materi penyuluhan adalah tersedianya sarana materi penyuluhan kehutanan guna bertambahnya informasi bagi penyuluh kehutanan dan masyarakat tentang kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Tujuannya adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan penyuluh kehutanan, pelaku utama dan pelaku usaha tentang kebijakan, ilmu dan teknologi kehutanan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Hasil kegiatan pengembangan materi penyuluhan sebagaimana tabel 7:

Tabel 7. Pengembangan Materi Penyuluhan Tahun 2016

No	Jenis Media (Cetak/elektronik)	Judul	Ket.
1	Penggandaan materi penyuluhan	a) Penggandaan Buku Saku Penyuluhan Kehutanan.	1.250 eks 500 eks
		b) Penggandaan Buku Statistik Pusat Penyuluhan Tahun 2015	3.500 eks
		c) Buku Kerja Penyuluh Tahun 2017	600 eks
		d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari	1.000 eks
		e) Buku Peraturan Perundang-undangan tentang Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya	1.300 eks
		f) Buku materi penyuluhan "Teknik Pendampingan Kelompok Tani Hutan"	1.000 eks
		g) Buku materi penyuluhan "Menumbuhkembangkan Kelompok Tani Hutan"	750 eks 1.300 eks 1.250 eks
		h) Buku Jejaring Kerja dan Kemitraan	
		i) Buku Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam	
		j) Buku Materi Penyuluhan "Mendulang	1.200 eks

		Rupiah dari Kapulaga yang memuat potensi tanaman kapulaga untuk dikembangkan sebagai usaha masyarakat. k) Buku "Aren" l) Buku "Pendampingan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan"	1.000 eks
2	Penyusunan dan penerbitan majalah Kenari	1 edisi pada bulan Juni 2016	1.000 eks
3	Publikasi materi penyuluhan di media cetak	a) Ujung Tombak Suksesnya Program Kehutanan. b) Tak Sebatas Kelompok Tani Hutan yang Jadi Binaannya. c) Masyarakat Lewat Potensi Alam dan Hutan Sorong pada bulan September 2016. d) Potret Desa Peduli Lingkungan Bebas dari Limbah pada bulan Agustus 2016. e) Mengelola HKm Sungai Buluh, Menjaring Turis pada bulan Agustus 2016. f) Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan Kehutanan g) Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan Kehutanan h) Menelusuri Gerak Penyuluh Kehutanan di Lombok i) Menanam Yang Penting Tumbuh bukan Sekedar Jumlah. j) Tanpa Narkoba Lingkungan Hidup Terjaga	Majalah Tropis Edisi 114 Tahun XIII, November 2016 Majalah Ekonomi Edisi November 2016 Majalah Ekonomi Edisi September 2016 Majalah Ekonomi Edisi Agustus 2016. Majalah Tropis Edisi 113 Tahun XII, Juni 2016 Tabloid Agro Edisi 597 tanggal 21-27 Juni 2016. Tabloid Agro Edisi 595 tanggal 7-13 Juni 2016. Majalah Tropis Edisi 112 Tahun XII, April 2016 Tabloid Agro Indonesia Edisi 591 tanggal 10-16 Mei 2016 Tabloid Agro Indonesia Edisi 591 tanggal 10-16 Mei 2016
4	Publikasi materi penyuluhan di media elektronik	a) Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan b) Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan	Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Pada pelaksanaannya, realisasi kegiatan pengembangan materi penyuluhan tahun 2016 dapat terserap sebesar dengan total anggaran Rp 1.699.687.600,-

atau sebesar 99,86%, yang terdiri dari penggandaan materi penyuluhan sebesar Rp 1.049.053.500,- ; penyusunan dan penerbitan majalah Kenari sebesar Rp 161.471.300,- ; dan publikasi materi penyuluhan di media cetak dan media elektronik sebesar Rp 489.162.800,- dengan realisasi fisik 100%.

13. Percontohan Kelompok Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pada tahun 2016, Pusat Penyuluhan melaksanakan kegiatan Percontohan Kelompok Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang mengacu Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan.

Fasilitasi percontohan kelompok pencegah kebakaran hutan dan lahan dimaksudkan untuk memberikan stimulan/dorongan bagi berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya diharapkan akan terbangun lebih banyak percontohan – percontohan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui kegiatan Kelompok Tani Hutan.

Tujuannya adalah agar petani mampu mendesain sendiri kegiatan di lahannya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Output yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan dan keterampilan masyarakat, baik kapabilitas perorangan maupun kapasitas kelompok dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sedangkan outcomenya adalah terbentuknya masyarakat di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan yang produktif dan mandiri, sehingga pembakaran hutan dan lahan berkurang.

Kegiatan Fasilitasi Percontohan Kelompok Pencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 dilaksanakan pada bulan Juli s/d November 2016. Kegiatan ini meliputi kegiatan sekolah lapang dan pembuatan unit percontohan. Prioritas kegiatan diarahkan ke penguatan unit percontohan dengan kegiatan antara lain adalah fasilitasi green belt, pembukaan lahan tanpa bakar, pembuatan sekat bakar, pembibitan tanaman kehutanan, penanaman, pemeliharaan tanaman kehutanan, Agroforestry/silvopasture/silvofishery, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pengadaan sarana pencegahan

kebakaran hutan dan lahan, dengan persentase perbandingan sekolah lapang (30 %) dan unit percontohan (70%).

Biaya Kegiatan Fasilitas Percontohan Kelompok Pencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 disediakan oleh Pusat Penyuluhan. Penyaluran dana fasilitas dibayarkan secara langsung (LS) ke rekening masing – masing kelompok melalui KPPN setempat dengan 3 (tiga) tahap pembayaran, yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mekanisme pembayaran Tahap I sebesar 40 %, Tahap II diberikan sebesar 30%, dan Tahap III (tahap akhir) sebesar 30 % dari keseluruhan yaitu Rp. 25.000.000,-.

Kegiatan Fasilitas Percontohan Kelompok Pencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 diprioritaskan kepada Kelompok Tani Hutan yang memiliki kriteria antara lain : KTH yang berada di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan; KTH yang menerapkan pola pembukaan lahan tanpa bakar; Memiliki legalitas sebagai KTH (SK Kepala Desa/Camat/Bupati/Kepala UPT/Akte Notaris); Memiliki usaha produktif di bidang kehutanan, yang prospektif untuk dikembangkan; Terdapat penyuluh kehutanan sebagai pendamping kegiatan; Apabila di lokasi tidak terdapat penyuluh kehutanan dapat didampingi oleh Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)/Kader Konservasi/tenaga teknis lain dari instansi kehutanan yang ditugaskan untuk mendampingi kegiatan.

Kelompok Tani Hutan (KTH) penerima kegiatan fasilitas percontohan Kelompok Pencegah Kebakaran Hutan dan Lahan ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kelayakan Rancangan Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Nomor : SK. 41/LUH/KP/PPSDM.0/5/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Hutan Penerima Kegiatan Fasilitas Percontohan Kelompok Pencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 dan SK.52/LUH/KP/PPSDM.0/7/2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Hutan Pengganti Penerima Kegiatan Fasilitas Percontohan

Kelompok Pencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016. Berikut adalah lokasi dan nama KTH yang telah ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Fasilitas Percontohan Kelompok Pencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 sebagaimana tabel 8 berikut:

Tabel 8. Nama dan lokasi KTH penerima Kegiatan Fasilitas Percontohan Kelompok Pencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016

No	Nama KTH	Alamat	Kabupaten	Provinsi	Pendamping Kegiatan
1	Halaman Kuyang Lestari	Desa Rumbio, Kecamatan Kampar	Kampar	Riau	Dasril
2	Mekar Jaya	Desa Beringin Jaya, Kecamatan Sengingi Hilir	Kuantan Sengingi	Riau	Sainuddin Nasution
3	Berkah Bersama	Desa Petapahan, Kecamatan Tapung	Kampar	Riau	Junaidi
4	Kelompok Tani Pemadam Jaya	Desa Air Hitam SPTN Wilayah I	Lubuk Kembang Bunga	Riau	Fauzan Kahfi, S.Hut
5	Kelompok MPA Gampong Pasie Lembang	Desa/Gampong Pasie Lembang, Kecamatan Kluet	Aceh Selatan	Aceh	Slamet Indarjo, S.Hut
6	Maju	Desa Catur Usaha, Kecamatan Dendang	Tanjab Timur	Jambi	Donal Ade Putra, S.Hut
7	Sugih Mukti	Desa Catur Usaha Kec. Dendang	Tanjab Timur	Jambi	Donal Ade Putra, S.Hut
8	Mencolok II	Dusun Mencolok Laut, Desa Mencolok kec. Mendahara Ulu	Tanjab Timur	Jambi	Joko Triono, S.Hut
9	Meranti Jaya	Desa Muara Merang Kec. Bayung Lencir	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan	Andri Abbas, S.Hut
10	Harapan Baru	Kel Muara Kuang Kec. Muara Kuang	Ogan Ilir	Sumatera Selatan	Dyah Puspitasari, S.Hut
11	Bukit Indah	Desa Muara Danau Kec Semendo	Muara Enim	Sumatera Selatan	Beni Rahmad, S.Hut
12	Kelompok Sumber Rejeki dan Kelompok Tani Harapan	Desa Sebokor, Kecamatan Air Kumbang	Banyuasin	Sumatera Selatan	Julita Pitria S.Hut
13	Rimba Raya	Desa Belangian Kec. Aranio	Banjar	Kalimantan Selatan	Rizky Anugerah Rahmani, Amd
14	Bunga Matahari	Desa Batung, Kec. Piani	Tapin	Kalimantan Selatan	Anwar
15	Berkat Usaha	Desa Kindingan, Kec. Hantakan	Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	Rusmayadi
16	Aman Sentosa	Desa Sungai Awan Kiri Kec. Muara Pawan	Ketapang	Kalimantan Barat	Maryati, S.Hut
17	Usaha Parit Latong	Dusun Parit Latong Desa Jungkat Kec. Siantan	Mempawah	Kalimantan Barat	Yunita Wahyuni, S.Hut
18	Seruni Madani	Desa Rasau Jaya Umum Kec. Rasau Jaya	Kubu Raya	Kalimantan Barat	Sumirah

19	Karya Tani Limbung	Dusun Mulyorejo Desa Limbung Kec. Sungai Raya	Kubu Raya	Kalimantan Barat	Ismail
20	Harapan Tani 1	Kelurahan Kalamangan Kecamatan Sebangau	Palangkaraya	Kalimantan Tengah	Wahidah, SP
21	Panenga	Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	Antony, S.Hut
22	Jaya Lestari	Desa Tarung Manuah Kecamatan Basarang	Kapuas	Kalimantan Tengah	Singah, S.Hut
23	Kelompok Nelayan Sungai Buluh	Desa Muara Dua, Kecamatan Seruyan hilir	Seruyan	Kalimantan Tengah	Nindra Karma dan Syaifudin
24	KTH Desa Sumber Urip	Desa Sumber Urip, Kecamatan Pronojiwo	Lumajang	Jawa Timur	Trianingtyas Sulistyowati, S.Hut
25	KTH SPKP Merapi Asri	Desa Ngargomulyo Kec. Dukun	Magelang	DIY	Khamdan Primandaru



Gambar 28. Rangkaian Pelatihan Anggota KTH Sugih Mukti dan Manggala Agni Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 971.236.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 970.983.299,- atau sekitar 99,97% serta realisasi capaian fisik sebesar 100%.

14. Workshop Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan

Pusat Penyuluhan melaksanakan kegiatan Workshop Pengembangan materi Penyuluhan dengan tema “Sekolah Lapang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan”, dengan maksud untuk mengembangkan metode penyuluhan sekolah lapang agar dapat berfungsi optimal dalam kegiatan penyuluhan. Adapun tujuannya adalah tersusunnya modul dan panduan mengenai sekolah lapang yang berisikan materi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan.

Kegiatan Workshop Sekolah Lapang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 April 2016 di di Emersia Hotel & Resort, Jl. Wolter Monginsidi No. 70, Bandar Lampung. Tema yang dibahas yaitu “Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Metode Sekolah Lapang”. Peserta workshop terdiri dari Penyuluh Kehutanan (pusat dan daerah), PKSM, masyarakat peduli api, manggala agni dan lainnya yang dinilai perlu yang keseluruhannya berjumlah 50 orang yang berasal dari Penyuluh Kehutanan Pusat, Penyuluh Kehutanan daerah, PKSM, Manggala Agni, dan Masyarakat Mitra Polhut.

Jadwal pelaksanaan kegiatan Workshop Sekolah Lapang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah sebagai berikut :

Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narasumber
Kamis, 21 April 2016	10.00 – 12.00	Registrasi	Panitia
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
	13.00 – 13.30	Pembukaan oleh Setbakorluh	Kepala Setbakorluh Prov. Lampung
	13.30 – 15.00	Kebijakan pemerintah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Ferdian Krisnanto, S.Hut, MP (Direktorat Kebakaran Hutan dan Lahan)
	15.00 – 15.30	Coffee break	
	15.30 – 18.00	– Metode sekolah lapang – Penerapan metode sekolah lapang dalam pengembangan kemandirian masyarakat	Ir. Sri Puji Rahayu, MM (Penyuluh Utama, Kementerian Pertanian) Ir. Herlin Retnowati (Dinas Pertanian Prov. Lampung)
	18.00 – 19.00	ISHOMA	

Tanggal	Waktu	Kegiatan	Narasumber
	19.00 – 21.00	<ul style="list-style-type: none"> - Pengalaman pendampingan masyarakat di kawasan konservasi - Pengalaman pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (MPA) 	Dr. Pitojo Budiono, M.Si (Fisip – Unila) Sugiyanto (MPA Kebagusan Pesawaran)
Jumat, 22 April 2016	08.00 – 10.00	Diskusi kelompok	
	10.00 – 10.15	Coffee break	
	10.15 – 12.00	Diskusi kelompok lanjutan	
	12.00 – 13.30	ISHOMA	
	13.30 – 15.30	Diskusi kelompok lanjutan	
	15.30 – 16.00	Coffee break	
	16.00 – 17.30	Diskusi kelompok lanjutan	
	17.30 – 19.00	ISHOMA	
	19.00 – 20.30	Pleno	
Sabtu, 23 April 2016	07.30 – selesai	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kegiatan Pusat Penyuluhan - Penutupan 	Kepala Pusat Penyuluhan



Gambar 29. Rangkaian Kegiatan Workshop Sekolah Lapang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 190.360.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 189.787.400,- atau sekitar 99,69%, serta realisasi capaian fisik sebesar 100%.

15. Temu Teknis Penyuluh Kehutanan KSDAE

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.46/Menhut-II/2012 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan dalam Pasal 5 mengatur bahwa salah satu metode penyuluhan kehutanan dengan menyebarkan informasi. Penyebaran informasi tersebut dapat dilakukan melalui cybernet/cyber extention, penyiaran dan atau interaksi melalui internet. Dalam rangka menyebarkan penguasaan teknologi informasi tersebut, Pusat Penyuluhan menyelenggarakan kegiatan berupa pelatihan dengan memakai teknologi informasi berbasis website yaitu kegiatan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan dalam rangka Pengelolaan Website Sistem Informasi Penyuluhan.

Maksud dari penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan dalam rangka Pengelolaan Website Sistem Informasi Penyuluhan adalah memberikan pelatihan singkat tentang pengisian data penyuluh, kelompok tani hutan, jenis komoditas kelompok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM penyuluh kehutanan dan para pengelola penyuluhan dalam pengelolaan penyuluhan LHK.

Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah "Terlaksananya Temu Teknis Pengelolaan Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Kehutanan". Adapun outcome yang diharapkan adalah "Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SDM Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan di Pusat dan Daerah".

Kegiatan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan dalam rangka Pengelolaan Website Sistem Informasi Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 6 – 8 Oktober 2016 di Orchardz Hotel, Jl. Industri Raya No.8, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Peserta pelaksanaan kegiatan Temu Teknis Penyuluh dalam rangka Pengelolaan Sistem Informasi Penyuluhan sekitar 80 (delapan puluh) orang terdiri dari Pengelola penyelenggara penyuluhan daerah (Bakorluh, Dinas, BDLHK, penyuluh KSDAE dan penyuluh TN), Operator SIMLUH di daerah (Bakorluh, Dinas, penyuluh KSDAE dan penyuluh TN), Penyuluh Kehutanan Pusat, Pengelola Web Pusluh Pusat.



Gambar 30. Peserta Temu Teknis Pengelolaan Sistem Informasi

Jadwal pelaksanaan kegiatan Temu Teknis Penyuluh dalam rangka Pengelolaan Sistem Informasi Penyuluhan adalah sebagai berikut :

Jadwal	Waktu	Kegiatan	Narasumber
Kamis, 6 Oktober 2016	10.00 – 12.00	Registrasi	PANITIA
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
	13.00 – 15.00	Pembukaan	
		Kebijakan Pengembangan Penyebaran Informasi Pusat Penyuluhan	Kepala Pusat Penyuluhan
	15.00 – 15.30	Coffee break	
	15.30 – 16.30	Kebijakan Ketenagaan Penyuluhan	Kabid Ketenagaan Penyuluhan
	16.30 – 17.30	Kebijakan Kelembagaan Penyuluhan	Kabid Kelembagaan Penyuluhan
	17.30 – 19.00	ISHOMA	
19.00 – 21.00	Kebijakan Pengembangan Data dan Informasi KLHK	Tentative	
Jumat, 7 Oktober 2016	08.00 – 09.00	Pengenalan Aplikasi Cyber Extention (Cybex)	Aghi Perkasa
	09.00 – 10.00	Praktek Aplikasi Cybex	Promo Jatmiko Fredius Iswanto
	10.00 – 10.15	Coffee break	
	10.15 – 11.15	Praktek Aplikasi Cybex (lanjutan)	Promo Jatmiko Fredius Iswanto
	11.15 – 13.00	ISHOMA	
	13.00 – 14.00	Pengenalan Aplikasi Sistem Informasi Penyuluhan (SIMLUH)	Aghi Perkasa
	14.00 – 16.00	Praktek Aplikasi SIMLUH	Aghi Perkasa Chandra Wicaksono
	16.00 – 16.15	Coffee break	
	16.15 – 20.30	Praktek Mandiri Peserta (Input Data Penyuluhan)	PANITIA
	20.30 – 21.00	Pengumpulan data kepada PANITIA	PANITIA
Sabtu, 8 Oktober 2016	08.00 – 09.00	Penutupan	Kepala Pusat Penyuluhan
	09.00 – selesai	Administrasi peserta	PANITIA



Gambar 31. Penyampaian Materi Pengenalan Aplikasi SIMLUH dan CYBEX

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 470.050.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 469.072.118,- atau sekitar 99,79%, serta realisasi capaian fisik sebesar 100%.

16. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahun 2017

Dokumen Renja Pusat Penyuluhan Tahun 2017 adalah instrumen dasar sebagai acuan kerangka kerja, perkiraan pembiayaan, dan capaian fisik pada kegiatan peningkatan penyuluhan.

Output dari kegiatan Penyusunan Renja Tahun 2017 adalah tersusunnya dokumen perencanaan tahunan atau Renja mengacu pada Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2015 – 2019.

Outcome dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan tahun 2017.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 161.226.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 159.922.700,- atau sekitar 99,19%, serta realisasi capaian fisik sebesar 100%.

17. Penyusunan Dokumen RKA-KL Pusat Penyuluhan Tahun 2017

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas dalam penyusunan anggaran yang dilakukan setiap tahun dan memberi keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam RKA-K/L. Output dari kegiatan ini yaitu tersusunnya RKA-KL Pusat Penyuluhan Tahun 2017.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 201.400.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 199.880.700,- atau sekitar 99,25%, serta realisasi capaian fisik sebesar 100%.

18. Penyusunan Laporan Monev Penyuluhan

Penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan meliputi monev bidang pengembangan penyuluhan, ketenagaan Penyuluh Kehutanan dan bina pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan mengukur pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan atau aturan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui kondisi saat ini pada bidang pengembangan penyuluhan, ketenagaan Penyuluh Kehutanan dan bina pemberdayaan masyarakat
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di tingkat provinsi/ kabupaten/ kota.

Outcome dari kegiatan ini yaitu tersusunnya laporan monev penyuluhan kehutanan.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 1.158.815.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.155.871.001,- atau sekitar 99,75%, serta realisasi capaian fisik sebesar 100%.

19. Penyusunan Programa Penyuluhan

Outcome dari kegiatan ini yaitu tersusunnya dokumen Programa Penyuluhan Kehutanan. Dengan tersusunnya Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2017 ini diharapkan terdapatnya sinergisitas baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dengan unsur terkait lainnya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan kehutanan dan tercipta hubungan kemitraan antara sasaran utama dan sasaran antara yang saling menguntungkan serta sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Penyuluh (RKTP) bagi para Penyuluh Kehutanan di pusat Tahun 2017 dan sekaligus sebagai bahan perencanaan penyusunan anggaran tahun 2017.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 174.995.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 174.865.600,- atau sekitar 99,93%, serta realisasi capaian fisik sebesar 100%.

20. Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai dan Evaluasi Administrasi

Maksud dan tujuan pembinaan pegawai lingkup Pusat Penyuluhan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Membangun motivasi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Menjalin Kerjasama, Meningkatkan silaturahmi dan menumbuhkan keterpaduan sikap dan semangat seluruh jajaran pegawai Pusat Penyuluhan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Kegiatan Pembinaan Pegawai Lingkup BP2SDM dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 28 s.d 30 April 2016 bertempat di Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam yang diikuti sebanyak 301 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat BP2SDM 70 orang
2. Pusat Diklat SDM LHK 102 orang
3. Pusat Penyuluhan 48 orang
4. Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM 33 Orang
5. Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan 28 orang.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 307.450.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 307.280.800,- atau sekitar 99,94%, serta realisasi capaian fisik sebesar 100%.

21. Penyelenggaraan Penatausahaan BMN

Penyusunan dan Penyajian Laporan Barang Milik Negara (L-BMN) Tahun Anggaran 2016 telah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset Pusat Penyuluhan yang dihapuskan berupa alat perkantoran sebanyak 90 unit dalam keadaan rusak berat; kendaraan roda empat sebanyak 1 unit; dan kendaraan roda dua sebanyak 1 unit dengan risalah lelang Nomor: 220/2016 tanggal 9 September 2016 dan risalah lelang Nomor: 340/2016 tanggal 6 Desember 2016.

22. Penyusunan Laporan Satker (Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan)

Laporan Satker dibuat dalam bentuk bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan dan pada akhir tahu anggaran disusun dalam bentuk buku dan untuk digunakan bahan evaluasi untuk kegiatan bulanan sejumlah 12 laporan, laporan triwulan ini disusun dalam bentuk buku dan untuk digunakan bahan evaluasi untuk kegiatan triwulan sejumlah 4 laporan, laporan semester disusun dalam bentuk buku dan untuk digunakan bahan evaluasi untuk kegiatan semester sejumlah 2 laporan dan untuk laporan tahunan ini disusun dalam bentuk buku dan untuk digunakan bahan evaluasi untuk kegiatan tahunan Satker dan disusun dalam bentuk Laporan Tahunan dengan jumlah 1 laporan.

Maksud Penyusunan Laporan Satker (Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan) adalah memonitor perkembangan penyerapan anggaran sesuai jadwal yang telah direncanakan dalam POK.

Tujuannya dari kegiatan ini adalah mencatat pelaksanaan (progres) kegiatan Satker sesuai dengan format laporan, bulanan, triwulan dan semester dan hasil laporan triwulan tersebut dilaporkan berjenjang ke Sekbandan P2SDM dan Biro Perencanaan Setjen untuk dilanjutkan ke Bappenas (sebagai laporan Satuan Kerja Tahun berjalan).

Outcome dari kegiatan ini yaitu tertibnya penyusunan laporan kegiatan Satker Pusat Penyuluhan Tahun 2016, perkembangan laporan Satker ini dipantau langsung oleh Set. Badan P2SDM, Borocan dan Bappenas.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 100.889.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 100.769.150,- atau sekitar 99,98%, serta realisasi capaian fisik sebesar 100%.

23. Penyusunan Design SPIP.

Pusat Penyuluhan menyusun desain penyelenggaraan SPIP yang berisi strategi dan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pusat Penyuluhan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.38/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan SPIP Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sasaran penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tersusunnya alat bantu pengendalian intern dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Penyuluhan tahun 2016. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendeteksi terjadinya kesalahan (mismanagement) dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi, membantu pengamanan asset terkait terjadinya kecurangan (fraud), pemborosan, dan salah penggunaan anggaran yang tidak sesuai tujuan.

Pada tahun 2016, Risiko yang ditemukan pada Pusat Penyuluhan sebanyak 5 risiko yang signifikan. Dari hasil pemantauan setiap triwulan pada 3 Kegiatan dengan 5 SOP pengendalian risiko, diperoleh hasil kegiatan Pusat Penyuluhan selama 1 (satu) tahun sudah berjalan dalam kategori Efektif (E).

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 136.250.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 135.901.950,- atau sekitar 99,74%, serta realisasi capaian fisik sebesar 100%.

24. Temu Teknis Penyelenggaraan Penyuluhan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengamanatkan bahwa Programa Penyuluhan Kehutanan merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Peraturan Menteri Kehutanan No.46/Menhut-II/2012 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan dalam Pasal 5 mengatur bahwa salah satu metode penyuluhan kehutanan dengan menyebarkan informasi. Penyebaran informasi tersebut dapat dilakukan melalui cybernet/cyber

extention, penyiaran dan atau interaksi melalui internet. Untuk itu pada tahun 2016 dilaksanakan kegiatan Temu Teknis Pengelolaan Website Sistem Informasi Penyuluhan.

Maksud dari penyelenggaraan Temu Teknis Pengelolaan Website Sistem Informasi Penyuluhan adalah memberikan pelatihan singkat tentang pengisian data penyuluh, kelompok tani hutan, jenis komoditas kelompok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM penyuluh kehutanan dan para pengelola penyuluhan dalam pengelolaan penyuluhan LHK.

Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah "Terlaksananya Temu Teknis Pengelolaan Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Kehutanan". Adapun outcome yang diharapkan adalah "Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SDM Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan di Pusat dan Daerah".

Kegiatan Temu Teknis Pengelolaan Website Sistem Informasi Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2016 di Hotel IBIS Jakarta Sliipi, JL. Letjen S. Parman Kav. 59 Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dengan tema kegiatan : "Meningkatkan Kualitas SDM Penyuluh Kehutanan dan para Pengelola Penyuluhan dalam Pengelolaan Sistem Informasi Penyuluhan untuk Mendukung Suksesnya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan". Mekanisme pelaksanaan kegiatan Temu Teknis Penyuluh dalam rangka Pengelolaan Sistem Informasi Penyuluhan ini adalah tatap muka dan diskusi langsung serta praktek. Peserta pelaksanaan kegiatan Temu Teknis Pengelolaan Website Sistem Informasi Penyuluhan sekitar 70 (tujuh puluh) orang terdiri dari Pengelola penyelenggara penyuluhan di provinsi, Operator SIMLUH di provinsi, Penyuluh Kehutanan Pusat, dan Pengelola Web Pusat Penyuluhan.

Jadwal pelaksanaan kegiatan Temu Teknis Pengelolaan Website Sistem Informasi Penyuluhan adalah sebagai berikut :

Jadwal	Waktu	Kegiatan	Narasumber
Senin, 30 Mei 2016	10.00 – 12.00	Registrasi	Panitia
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
	13.00 – 15.00	- Pembukaan - Kebijakan Pengembangan Penyebaran Informasi Pusat Penyuluhan	Kepala Pusat Penyuluhan
	15.00 – 15.30	Coffee break	
	15.30 – 17.30	Kebijakan Pengembangan Data dan Informasi KLHK	PM
	17.30 – 19.00	ISHOMA	
	19.00 – 20.00	Pengenalan Aplikasi Cyber Extention (Cybex)	Pomo Jatmiko
Selasa, 31 Mei 2016	08.00 – 10.00	Praktek Aplikasi Cybex	Pomo Jatmiko Reza Rahman Abdurachman Qiofiqi
	10.00 – 10.15	Coffee break	
	10.15 – 11.15	Pengenalan Aplikasi Sistem Informasi Penyuluhan (SIMLUH)	Aghi Perkasa
	11.15 – 12.15	Praktek Aplikasi SIMLUH	Aghi Perkasa Guntur Andriyana Mumuh Muhtadin
	12.15 – 13.30	ISHOMA	
	13.30 – 14.30	Praktek Aplikasi SIMLUH (lanjutan)	Aghi Perkasa Guntur Andriyana Mumuh Muhtadin
	14.30 – 20.30	Praktek Mandiri Peserta (Input Data Penyuluhan)	PANITIA
	20.30 – 21.00	Pengumpulan data kepada PANITIA	
Rabu, 1 Juni 2016	08.00 – 09.00	Penutupan	Kepala Pusat Penyuluhan
	09.00 – selesai	Administrasi peserta	PANITIA



Gambar 32. Pelaksanaan Kegiatan Temu Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Penyuluhan

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 170.700.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 170.394.500,- atau sekitar 99,82%, serta realisasi capaian fisik sebesar 100%.

25. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Koperasi

Untuk menumbuhkembangkan kelembagaan KTH perlu dibentuk koperasi KTH. Pada tahun 2015 - 2019 BP2SDM melalui Pusat Penyuluhan menargetkan untuk memfasilitasi pembentukan 500 Koperasi KTH. Untuk tahun 2016 ditargetkan terbentuk 22 unit koperasi primer tani hutan tingkat tapak di dalam KPH dan HR sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Fasilitasi pembentukan KTH menjadi Koperasi KTH dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan kelembagaan KTH dan mewujudkan anggota koperasi KTH yang mandiri dan sejahtera dengan memanfaatkan hutan secara lestari dan berkelanjutan melalui kegiatan usaha koperasi KTH.

Adapun tujuannya antara lain untuk meningkatkan kelembagaan KTH melalui peningkatan kapasitas anggota KTH dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif dengan menerapkan tata kelola kelembagaan, kawasan dan usaha yang baik dan berkelanjutan, sehingga berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan anggota KTH.

Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya KTH yang sudah memiliki lembaga koperasi sebanyak 24 unit dengan adanya pengesahan akta pendirian koperasi KTH (notaris) dan pengesahan akta pendirian koperasi tertulis oleh pejabat yang berwenang setempat dalam hal ini yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Outcome dari terbentuknya Koperasi KTH yang yaitu meningkatnya kelembagaan KTH seiring dengan meningkatnya kapasitas anggota KTH dan meningkatnya ekonomi anggota KTH melalui usaha kelembagaan koperasi yang berkelanjutan.

Pada tahun 2016 telah terbentuk sebanyak 24 unit koperasi KTH yang terdiri dari 22 unit (poin 1 s/d 22) mendapatkan fasilitasi pembentukan koperasi dan 2 unit (poin 23 s/d 24) terbentuk dengan biaya mandiri.

Berikut adalah nama-nama KTH yang memperoleh fasilitasi penguatan dan pengembangan koperasi:

No	Nama KTH dan Bank Sampah	Alamat (Desa, Kec, Kab)	Provinsi	Kegiatan/ Usaha	Ketua	Pendamping Koperasi
1	KTH Lembah Hijau	Ds. Karang Dima, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	Lebah Madu Hutan, Pembibitan dan olahan HHKBK	Witarsa	Dharmansyah, SP
2	KTH Karang Bayan Lestari	Ds. Karang Bayan Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	Lebah Madu, gula aren	Suadi	Dewa Ngakan Putu Antara, SP
3	KTH Bina Harapan	Ds. Penambangan, kec. Sedong, Kab. Cirebon	Jawa Barat	Hutan Rakyat, PLBTH	Sukardi	Dede Rustaman, SP
4	KWT Dewi Sri	Ds. Bojongpicung, Kec. Bojongpicung, Kab. Cianjur	Jawa Barat	Cuka Kayu	Euis Maryati	Achmad Abdul Hakim, SP
5	KTH Tanah Abang	Desa Gisting Atas, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus	Lampung	Penyulingan minyak atsiri, bibit MPTS, HHBK	Supardi	Arif Sudaryono
6	KTH Wana Jaya	Ds. Sendang Baru, Kec. Sendang Agung, Kab. Lampung Tengah	Lampung	Gula aren, kemiri, pinang	Marikun	Suhartono
7	KTH Sembodo	Dsn Kalibiru, Ds. Hargowilis Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo	D.I.Yogyakarta	Pengolahan empon-empon, wisata alam	Sumarjana	Suroso, SP
8	KTH Sumber Rejeki	Ds. Banaran 1, Ds. Banaran, Kec. Playen, Kab. Gunung Kidul	D.I.Yogyakarta	Lebah Madu	Purwanto	Widiyanto
9	KTH Lalayuan	Kel. Lahendong Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon	Sulawesi Utara	Gula Aren, HR, pengolahan etanol	Wellem Supit	Mantje Jopie Sumolang
10	KTH Wonoasri	Desa Kertosari. Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang	Jawa Timur	Penampungan dan penggergajian kayu (sawmill)	Sukiman	Nurhayadi, SP

No	Nama KTH dan Bank Sampah	Alamat (Desa, Kec, Kab)	Provinsi	Kegiatan/ Usaha	Ketua	Pendamping Koperasi
11	KTH Rimba Mas	Desa Gerbo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan	Jawa Timur	Pembibitan, HR, Agroforestry, jahe instan, kopi bubuk, jamur tiram	Mulyadi	Suwandi, SP
12	KTH Sumber Makmur	Desa Manduro, Kec. Kabuh, Kab. Jombang	Jawa Timur	Budidaya tanaman hutan, penanaman bawah tegakan	Riono	Sudjarwo, SP
13	KTH Pancoran Lestari	Desa Mundeh Kec. Selemadeg Barat Kab. Tabanan	Bali	Agroforestry, HR, Pembibitan	I Putu Wirawan	I Ketut Gede Intan Kurniawan, S.Hut
14	KTH Maju Jaya	Ds. Tanjung Dalam, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong	Bengkulu	HKM	Bambang Irawan	Suroto
15	KTH Wana Lestari	Ds. Gunungsari, Kec. Tlogowungu, Kab. Pati	Jawa Tengah	Penggilingan/pengolahan kopi, ternak sapi dan kambing	Ngarjono	Sri Hastuti, SP
16	KTH Ngudi Utomo	Ds. Sukorejo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali	Jawa Tengah	Jamur tiram, anyaman bambu, pembibitan, pupuk organik	Sarono	Kukuh Subiyanto, SP
17	KTH Sari Murni	Ds. Hatungun, Kec. Hatungun, Kab. Tapin	Kalimantan Selatan	Lebah madu, pembibitan, HR, PLBTH	Ibnu Kasir Al Aqili	Muhammad Ikhsan, SP
18	KTH Sejahtera Bersama	Desa Nusapati, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah	Kalimantan Barat	Lebah madu, gaharu, MPTS	Ahmadiyah Ham	Yanuar, SP
19	KTH Peureului Nanggroe	Ds. Pulo Gisa, Kec. Gandapura, Kab. Bireun	NAD	Silvopasture, HHBK pengolahan bambu	Muhammad Ali	Fauzah, S. Hut
20	KTH Aur Serumpun	Nagari Pasie Laweh, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman	Sumatera Barat	HKM, pembibitan, HHBK	Oyong Liza Arif	Jhoni Hendra, SP
21	Bank Sampah Gerakan Untuk Lingkungan (GAUL)	RW 16 Perumahan Bojong Depok Baru 2, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor	Jawa Barat	Penjualan limbah anorganik, kerajinan perca, bungkus kemasan minuman	Nurhasanah	Yuliana Rini DY, S. Pi, ME
22	Bank Sampah Untung Nabung Sampah (UNASA)	Bumi Pertiwi blok FF 2, Blok FG-10 RT 2 RW 14 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor	Jawa Barat	Daur ulang plastik dan pupuk cair	Isti Wahyuni	Dewi Sawiyah Prangesti

No	Nama KTH dan Bank Sampah	Alamat (Desa, Kec, Kab)	Provinsi	Kegiatan/ Usaha	Ketua	Pendamping Koperasi
23	KSU Tetesan Embun	Ilalang Panjang Indrapura, Kec. Airpura, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Sumatera Barat	Hutan Tanaman Rakyat	Safrizal	Otria, S. Hut
24	KTH Wanamitra Koridor	Desa Cipeuteuy, Kec. Kabandungan, kab. Sukabumi	Jawa Barat	Hutan Rakyat, Agroforestry	Dayat Hidayat	Entis Sutisna



Gambar 33. Pembuatan Papan Nama Koperasi Produsen Petani Hutan Sejahtera Bersama, Kalimantan Barat



Gambar 34. Rapat Penyusunan Rapat Kegiatan Koperasi Produsen Petani Hutan Sejahtera Bersama, Kalimantan Barat



Gambar 35. Produk Petani Hutan Sejahtera Bersama, Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil verifikasi serta pertanggungjawaban administrasi masing-masing pelaksana kegiatan (Kelompok Tani), realisasi kegiatan masing-masing sudah mencapai 100% dari total dana fasilitasi yang diberikan Rp. 15.000.000,-.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 819.070.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 818.548.900,- atau 99,94 %, serta realisasi capaian fisik sebesar 100%.

26. Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluhan Kehutanan Pendamping Koperasi.

Dalam penumbuhkembangan koperasi tersebut, tentu diperlukan adanya tenaga penyuluh kehutanan yang handal dan kompeten sebagai pendampingnya. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas penyuluh calon pendamping koperasi KTH baik dari segi kemampuan teknis kehutanan, teknis pengelolaan usaha, kelembagaan maupun managerial. Salah satunya adalah melalui Temu Teknis Pendamping Koperasi KTH dan Kelompok Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup. Dari kegiatan tersebut diharapkan calon pendamping koperasi KTH dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pendampingan Koperasi. Dengan demikian diharapkan proses pendampingan Pembentukan Koperasi KTH dan Kelompok Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup di semua lokasi dapat berjalan efektif dan efisien.

Temu Teknis Penyuluh Pendamping Koperasi KTH dan Kelompok Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh pendamping dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan ekonomi KTH.

Adapun tujuannya adalah untuk : (1) meningkatkan wawasan dan pemahaman penyuluh pendamping terhadap pembentukan koperasi KTH dan Kelompok Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup; (2) meningkatkan kompetensi penyuluh dalam pendampingan pembentukan koperasi KTH dan Kelompok Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup; serta(3) meningkatkan jejaring kerjasama antar penyuluh pendamping koperasi KTH dan pendamping teknis Kelompok Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup.

Output yang diharapkan dari Temu Teknis Penyuluh Pendamping Koperasi ini adalah meningkatnya :

1. Meningkatnya wawasan dan pemahaman penyuluh pendamping terhadap pembentukan koperasi KTH dan Kelompok Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup;
2. Meningkatnya kompetensi penyuluh dalam pendampingan pembentukan koperasi KTH dan Kelompok Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup;
3. Meningkatnya jejaring kerjasama antar penyuluh pendamping koperasi KTH dan pendamping teknis Kelompok Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup.

Outcome yang diharapkan adalah berkembangnya kelembagaan koperasi KTH dan Kelompok Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup sebagai kelembagaan ekonomi masyarakat.

Temu Teknis Penyuluh Pendamping Koperasi KTH diselenggarakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 1 s/d 3 Juni 2016 di Hotel Jayakarta Bandung. Peserta Temu Teknis Penyuluh Pendamping Koperasi KTH Tahun 2016 sebanyak 44 orang yang terdiri dari calon penyuluh pendamping Koperasi dan Ketua KTH/Bank Sampah dari 13 provinsi di Indonesia.



Gambar 36. Rangkaian kegiatan bimbingan teknis Koperasi KTH

Rangkaian acara Temu Teknis Penyuluh Pendamping Koperasi Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tanggal/ Waktu	Acara	Pembicara/ Fasilitator	Keterangan
Rabu, 1 Juni 2016			
11.00 – 14.00	Registrasi dan ISHOMA	Sie Sekretariat, Akomodasi dan Konsumsi	
14.00 – 15.00	Pembukaan: <ul style="list-style-type: none"> • Doa • Laporan Panitia • Lagu Indonesia Raya • Sambutan Sekretaris Bakorluh Jabar • Pembukaan oleh Kepala Pusat Penyuluhan 	Kabid Kelembagaan Penyuluhan Kepala Set Bakorluh Jabar Kapusluh	Doa : Nurhayadi Dirigen : Ida MC : Atu Kabid Kelembagaan Penyuluhan
15.00 – 15.30	ISHOMA		
15.30 – 17.30	Materi : <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Koperasi • Pengembangan Koperasi (Rencana pengembangan koperasi 3 tahun ke depan) • Usaha Koperasi • Permodalan • Fasilitasi Kemenkop UKM 	Kementerian Koperasi dan UKM	Moderator: Kabid Kelembagaan Penyuluhan
17.30 – 19.00	ISHOMA		
19.00 – 21.30	<ul style="list-style-type: none"> • Petunjuk Teknis Pembentukan Koperasi KTH • Sharing pengalaman tentang pengelolaan koperasi termasuk rencana kegiatan 3 tahun ke depan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid Kelembagaan Penyuluhan • Pengurus Koperasi Tanggamus, Lampung 	Moderator : Kasubid Kelembagaan Kelompok Masyarakat
Kamis, 2 Juni 2016			
06.00 – 07.00	Makan pagi		
07.00 – 08.30	Perjalanan kunjungan lapangan ke KPSBU (Koperasi Peternakan Sapi Bandung Utara)	Panitia	
08.30 – 11.30	Kunjungan ke koperasi di KPSBU	Panitia	Pemandu Acara Kunjungan Lapangan : Bu Endang
11.30 – 13.00	ISHOMA	Panitia	
13.00 – 14.30	Mobilisasi ke Hotel	Panitia	
14.30 – 15.30	ISHOMA	Panitia	
15.30 – 17.30	Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Tim Penyuluh	
17.30 – 19.00	ISHOMA	Panitia	
19.00 – 21.00	Pertanggungjawaban administrasi keuangan	Bu Santi dan Pak Kijan	

Tanggal/ Waktu	Acara	Pembicara/ Fasilitator	Keterangan
	(SPJ)		
Jumat, 3 Juni 2016			
06.00 – 08.00	Sarapan		
08.00 – 09.00	Penutupan		
09.00 – 11.00	- Penyelesaian administrasi - Peserta Kembali ke daerah asal		

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 278.650.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 277.293.000,- atau 99,51%, serta realisasi capaian fisik sebesar 100%.

27. Verifikasi pembentukan LP2UKS

Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) atau disebut Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya.

Sasaran kegiatan ini adalah kelompok tani hutan yang sudah naik kelas dari kelas pemula menjadi kelas madya yang sudah memiliki usaha yang berkembang dibidang lingkungan hidup dan kehutanan sehingga dapat menjadi tempat pelatihan bagi masyarakat/kelompok tani hutan lainnya.

Tujuan Wanawiyata Widyakarya yaitu untuk:

- meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup;
- meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dan perorangan dalam mengembangkan dan mengelola kegiatan pelatihan dan magang;
- mengembangkan kegiatan usaha masyarakat di bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup.

Outcome dari kegiatan ini yaitu tersedianya sarana bagi masyarakat sebagai tempat berlatih dan magang usaha lingkungan hidup dan kehutanan.

Tahun 2016 telah ditetapkan 17 unit LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya yang terdiri dari 15 KTH melalui penetapan dan 2 unit dari Bank Sampah secara mandiri. Adapun nama KTH, lokasi dan jenis usaha sebagaimana tabel 9.

Tabel 9. Daftar LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya Tahun 2016

No	Nama KTH	Alamat	Ketua Kelompok	Penyuluh Pendamping	Jenis Usaha
1	2	3	4	5	6
1	KORUT (Konsorsium Kotaagung Utara)	Jl. Raya Gisting Permai, Blok 23, Pekon Gisting Permai, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus Prov. Lampung	Fajar Sumantri	Drs. Eko Oesmento, M.MP	Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Aneka Usaha Kehutanan
2	KUB Mitra Mandala	Kp. Hariang, Desa. Hanang, Kec. Sobang, Kab. Lebak Prov. Banten	Anwar	Yaya Sudarya	Gula Aren
3	Giri Senang	Kp. Legok Nyenang, Desa. Giri Mekar, Kec. Cilengkrang, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat	Asep Rohman	Muhammad Yusuf, SP	Penanaman Lahan Bawah Tegakan Hutan (PLBTH) dan Pengolahan Hasil
4	Margo Mulyo	Desa. Burno, Kec. Senduro, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur	Hariyanto	Nurhayadi, SP	Agroforestry (Hutan Cadangan Pangan)
5	Asuhan Murni	Desa. Rantau Bujur, Kec. Telaga Bauntung, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan	Hamzah	Subhan Fahrani, S.Hut	Pembibitan
6	Meohai	Desa. Onewila, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara	Suparman	Uniar, S.TP	Lebah Madu
7	SPKP Wana Lestari	Dusun. Piloibata, Desa. Bualemo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara Prov. Gorontalo	Rahmat Lamaji, S.Sos	Nur Izati, S.Hut	Gula Aren
8	Kembang Lestari	Banjar. Tanah Ampo, Desa. Jungutan Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, Prov. Bali	I Ketut Latra	I Made Suastana, SP, M.Si	Pembibitan dan Agroforestry
9	Balla Tinggia	Dusun. Mangempang I Desa. Mangempang, Kec. Bungaya, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan	H. Thalib	Abd Haris T	Hutan Rakyat, Gula Aren dan Agroforestry
10	KUP Margo Rahayu	Dusun. Setana Kunci, Desa. Grenggeng, Kec. Karanganyar, Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah	Juliyah	Triyono, S.TP	Kerajinan Pandan

No	Nama KTH	Alamat	Ketua Kelompok	Penyuluh Pendamping	Jenis Usaha
1	2	3	4	5	6
11	Ruwas II	Dusun Karangjaya, Ds. Sukajaya, Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran, Prov. Jawa Barat	Endang Suryana	Haen Hendrik, SP	Cuka Kayu
12	Lestari	Dusun Sukajaya Lama, Ds. Langensari, Kec. Blanakan, Kab. Subang, Prov. Jabar	Syamsudin	Entan Sukardi	Pengolahan Mangrove
13	Master Jaya	Dusun. Tegal Rejo, Desa. Pasir Jaya, Kec. Rambah Hillir, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau	Ahmad Sobirin	Johan Wibowo, S.Hut	Lebah Madu
14	GERBANG (Gerakan Rehabilitasi Mangrove Lamnga)	Desa. Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh	Muhammad	Hirwansyah, S.Hut	Pembibitan dan Konservasi Mangrove
15	Citra Aroma	Dusun. Wesa, Negeri. Tawiri, Kota Ambon, Prov. Maluku	Rachel Tomahua	Rudy Ambeua, S.Hut	Minyak Atsiry
16	Mekar Jaya	Desa. Sindanghayu, Kec. Beber, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat	Dudung	Tati Karniati, SP	Jamur Kayu
17	KSM Rangka Mekar	RT. 01 RW. 10 Bogor Nirwana Residence, Kel. Rangka Mekar Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor – Prov. Jawa Barat	Sandi Adam		Bank Sampah



Gambar 37. Wanawiyata Widyakarya SKPK Wana Lestari, Gorontalo

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.800.555.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.791.703.030,- atau 99,51%, serta realisasi capaian fisik sebesar 100%.

28. Penyelenggaraan Pembinaan Penyuluh

Pemerintah telah mengatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 56 ditetapkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat maka pengelolaan yang profesional dalam menjamin pemanfaatannya yang berkesinambungan dan tetap lestari akan meningkatkan produktifitas kawasan hutan, untuk itu tindakan mengelola sangat dibutuhkan, management pengelolaan hutan berdasarkan pada asas lestari, manfaat, berkelanjutan, transparan dan lebih utama pengelolaan berbasis masyarakat.

Kegiatan Pembinaan Penyuluh Kehutanan Tahun 2016 diselenggarakan dalam rangka tersedianya Tenaga Pendamping Handal bagi KTH dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Hutan.

Penyelenggaraan Pembinaan Penyuluh Kehutanan ini, dimaksudkan untuk :

1. Memperbaiki berbagai komponen kegiatan penyuluh kehutanan dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan kehutanan yang dilakukan melalui pendampingan kegiatan antara lain : Pembangunan Hutan Rakyat (HR), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Gerakan rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Pembentukan Koperasi Kelompok Tani Hutan (KTH),
2. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan produktifitas sumber daya manusia atau kinerja penyuluh kehutanan, sehingga pengembangan karier Penyuluh Kehutanan dapat dilaksanakan secara optimal.

Tujuan Penyelenggaraan Pembinaan Penyuluh Kehutanan adalah :

1. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan secara optimal.
2. Terbangunnya motivasi, peningkatan kinerja serta tercipta penyuluh kehutanan yang professional
3. Terbentuknya Tenaga Pendamping Handal bagi KTH sebanyak 450 orang

4. Penempatan Penyuluh Kehutanan pada area kerja perhutanan sosial, kebakaran hutan dan restorasi ekosistem.
5. Diperoleh data-data KTH, Koperasi KTH, Sarana Prasarana Penyuluhan, Penyuluh Kehutanan PNS, PKSM, PKS, dan lain-lain

Outcome/hasil dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pengetahuan, wawasan, keterampilan penyuluh kehutanan, meningkatnya pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, terbentuknya koperasi Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ditargetkan, terhimpunnya data PK PNS, PKSM, PKS, Sarpras, KTH dan Koperasi KTH secara bertahap.

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluhan Kehutanan Tahun 2016 telah terlaksana di 14 lokasi dengan rincian sebagaimana tabel 10.

Tabel 10. Daftar kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan Penyuluh Kehutanan Tahun 2016

No	Provinsi	Tempat dan Waktu	Jumlah Peserta
1	Sumatera Selatan	Padang / 22-23 Februari;	30 orang
2	Kalimantan Barat	Pontianak/ 3-4 Maret;	25 orang
3	Kalimantan Selatan	Banjarbaru / 13-15 April;	35 orang
4	Sulawesi Tenggara	Kendari/ 20-21 April;	30 orang
5	Sulawesi Selatan	Makasar/ 17-18 Mei;	40 orang
6	Kalimantan Tengah	Palangka Raya/ 1-2 Juni;	27 orang
7	Nusa Tenggara Barat	Mataram/ 15-16 Juni;	35 orang
8	Sumatera Utara	Medan/ 22-23 Juni;	30 orang
9	Jambi	Jambi/ 24-25 Agustus;	30 orang
10	Aceh	Banda Aceh/ 21-23 September;	30 orang
11	Riau	Pekanbaru 27-29 September;	32 orang
12	Sumatera Barat	29 September - 1 Oktober;	30 orang
13	Kalimantan Timur	Samarinda/ 19-21 Oktober;	36 orang
14	Sulawesi Tengah	Palu/ 26-28 Oktober;	40 orang
	Total		450 orang



Gambar 38. Pembinaan penyuluh PNS di Provinsi Kalimantan Selatan

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.728.850.000,- terealisasi keuangan Rp. 1.728.227.950,- atau 99,96% dengan target fisik 1 laporan dengan capaian realisasi fisik 1 laporan atau fisik 100%.

29. Layanan Perkantoran.

Kegiatan layanan perkantoran terdiri dari operasional dan pemeliharaan perkantoran, kearsipan dan dokumentasi, perawatan kendaraan bermotor, pengiriman, serta laminasi.

Outcome dari kegiatan ini yaitu meningkatnya motivasi dan kinerja pegawai lingkup Pusat Penyuluhan.

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp 1.066.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.006.027.772,- atau 99,98 %, serta realisasi capaian fisik sebesar 100%.

V. ANALISIS PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

Permasalahan dan upaya pemecahan masalah kegiatan peningkatan penyuluhan diantaranya adalah:

1. Dukungan anggaran daerah/provinsi terhadap kegiatan peningkatan kelas KTH masih kurang, sehingga pelaksanaan peningkatan kelas KTH belum optimal sesuai dengan amanat Permenhut nomor P.57/Menhut-II/2015 tentang Pembinaan Kelompok Tani Hutan;
2. Belum adanya data yang terintegrasi yaitu data penyuluh kehutanan dengan KTH binaannya yang meliputi kelas KTH, komoditas/kegiatan/usaha KTH yang setiap saat dapat diakses dan diperbaharui oleh penyuluh kehutanan;
3. Pembuatan akta notaris dan pengesahan akta pendirian koperasi memerlukan waktu yang lama (minimal \pm 3 bulan), sehingga akta pendirian koperasi tidak dapat selesai secara bersamaan;
4. Sarana dan prasarana kelompok untuk mendukung kegiatan LP2UKS/wanawiyata widyakarya dan pemagangan masih kurang;
5. Dampak berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 memberikan ketidakpastian Penyuluh Kehutanan dalam melakukan pendampingan, terutama terkait dengan wilayah kerja sebelumnya.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan pelaksana penyuluhan daerah/provinsi untuk dapat menganggarkan kegiatan peningkatan penyuluhan pada anggaran daerah/APBD, sesuai dengan amanat Permenhut nomor P.57/Menhut-II/2015 tentang Pembinaan Kelompok Tani Hutan;
2. Melakukan perbaikan pada SIMLUH untuk mengintegrasikan data penyuluh pendamping dengan KTH binaan dan mendorong penyuluh pendamping agar memperbaharui data KTH binaannya;
3. Mendorong penyuluh pendamping KTH untuk mendampingi secara intensif pembentukan koperasi dan melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi,

UKM, Perindustrian dan Perdagangan agar pembuatan akta notaris dan akta pendirian koperasi dapat selesai dengan cepat;

4. Pusat Penyuluhan mendorong pelaksana penyuluhan daerah/provinsi agar dapat mendukung kegiatan LP2UKS melalui anggaran daerah/APBD untuk meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan di LP2UKS;
5. Melakukan koordinasi dengan pelaksana penyuluhan daerah/provinsi terkait dengan struktur organisasi pelaksana penyuluhan yang baru dan penyerahan P3D bidang penyuluhan.

VI. PENUTUP

Seluruh kegiatan Pusat Penyuluhan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana kerja dan tata waktu yang tertuang dalam POK. Total Anggaran (Pagu) pada Pusat Penyuluhan Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 18.247.053.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.717.165.472,- atau sebesar 91,62% atau setara dengan capaian 99,82% terhadap pagu self-blocking.

Capaian kinerja pada tahun 2016 diharapkan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih baik.